

**SKRIPSI**

**TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM MEWUJUDKAN *GREEN*  
*ECONOMY* DI KAWASAN PT VALE IGP MOROWALI**

**Disusun dan diusulkan oleh**

**NAMA : INDRA PARAWANSYAH**

**Nomor Stambuk : 105641101121**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2025**

**TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM MEWUJUDKAN GREEN  
ECONOMY DI KAWASAN PT VALE IGP MOROWALI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Tata Kelola Kolaboratif dalam Mewujudkan *Green Economy* di Kawasan PT VALE IGP MOROWALI

Nama Mahasiswa : Indra parawansyah

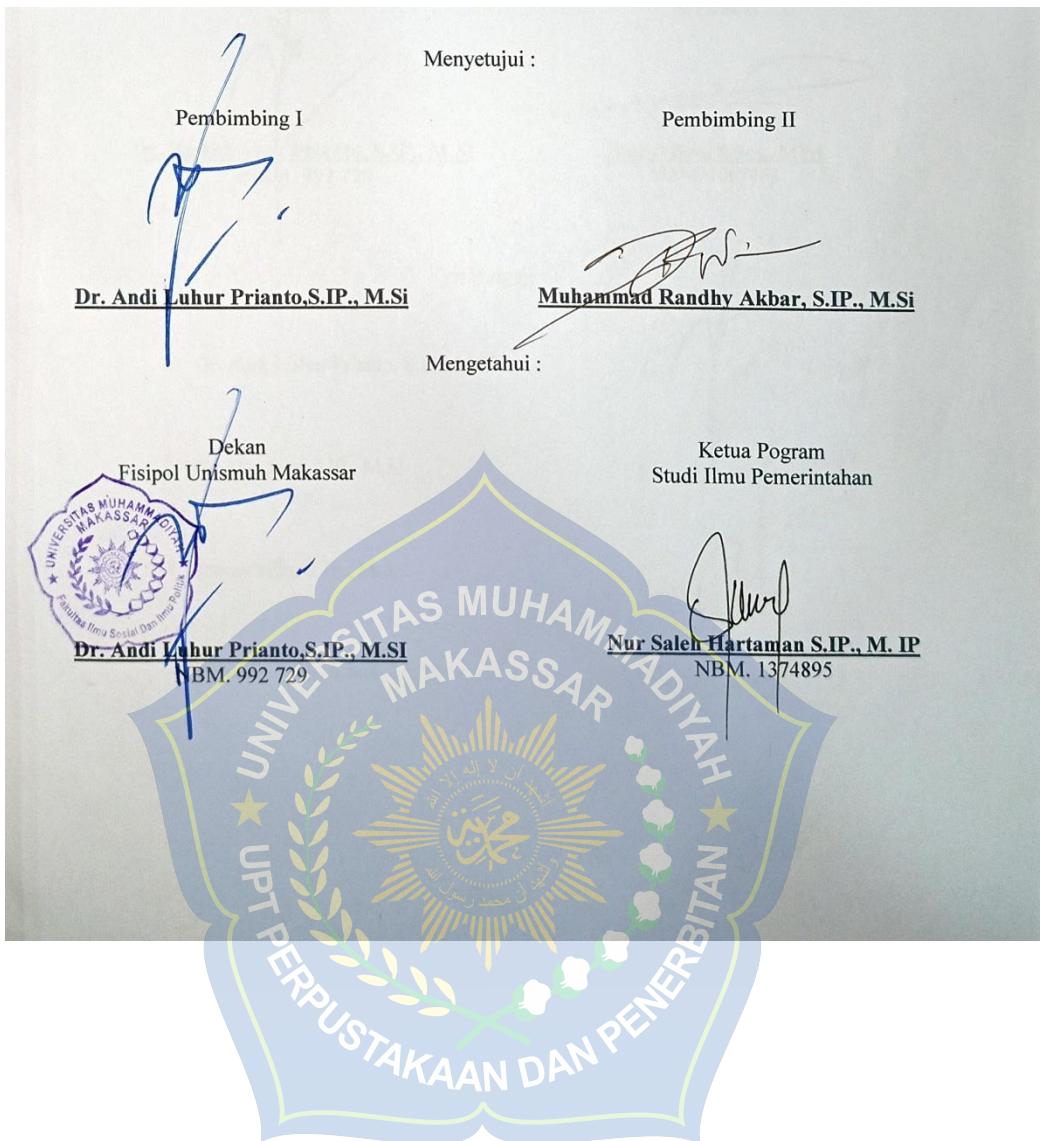
Nomor Induk Mahasiswa : 105641101121

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar





## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0475/FSP/A.4-II/VIII/47/2025 seagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana (S.IP) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis, 28 Agustus tahun 2025.





Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Indra Parawansyah

Nomor Induk Mahasiswa : 105641101121

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasi orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai

aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabupatan gelar akademik.

Makassar, Maret 2025  
Yang Menyatakan,

Indra Parawansyah



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola kolaboratif dalam mewujudkan *green economy* di kawasan PT Vale IGP Morowali. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pihak perusahaan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat local. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola kolaboratif di PT Vale mencakup lima indikator utama menurut Ansell & Gash (2008), yaitu *dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses,*

*pemahaman bersama, dan hasil antara.* Kolaborasi dilakukan melalui forum konsultasi publik, musyawarah desa, verifikasi program dengan pemerintah daerah, serta pelaksanaan program lingkungan, ekonomi, dan sosial. Keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh keterbukaan informasi, transparansi penggunaan anggaran, serta partisipasi aktif semua pihak. Penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan.

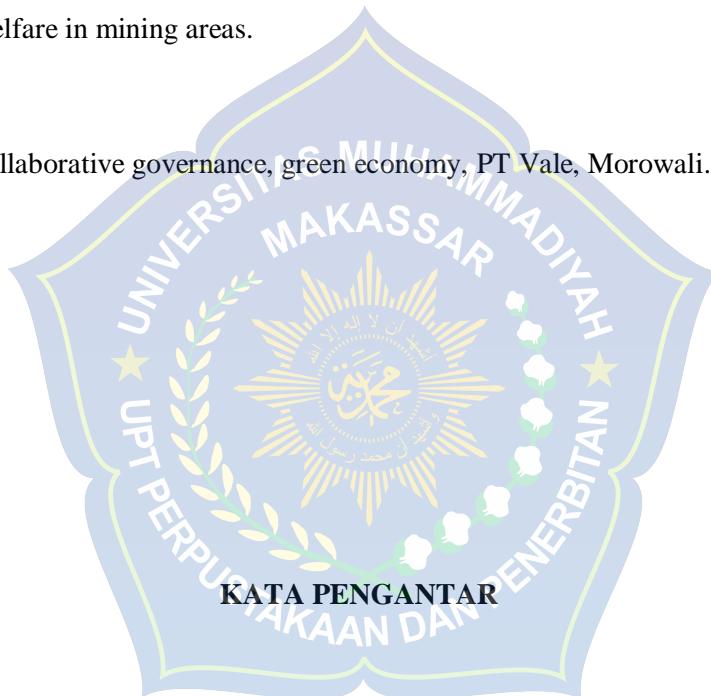
**Kata kunci** : tata kelola kolaboratif, *green economy*, PT Vale Igp Morowali.



This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in realizing a green economy within the operational area of PT Vale IGP Morowali. The research employs a qualitative descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, involving the company, sub-district government, village government, and local communities. The findings reveal that the implementation of collaborative governance at PT Vale encompasses five key indicators as proposed by Ansell & Gash (2008), namely face-to-face dialogue, trust-building,

commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. Collaboration is carried out through public consultation forums, village deliberations, program verification with local government, and the implementation of environmental, economic, and social programs. The success of this collaboration is influenced by information openness, transparency in budget use, and active participation of all stakeholders. This research emphasizes that collaborative governance is a key factor in achieving a balance between economic growth, environmental sustainability, and community welfare in mining areas.

**Keywords:** collaborative governance, green economy, PT Vale, Morowali.



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Tata Kelola Kolaboratif Dalam Mewujudkan Green Economy di Kawasan PT.Vale IGP Morowali". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan dalam segala aspek kehidupan.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaian Program Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajianya karna masih terbatasnya kemampuan penulis. Penghargaan dan rasa terima kasih yang tak terkira serta setinggi-tingginya penulis haturkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, bimbingan, dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Ratmi dan Ayahanda Fahsar Budiman, atas segala doa-doa yang di panjatkan, kasih saying, dukungan, serta pengorbanan yang tiada hentinya. Semangat dan motivasi hingga rasa sayangmulah yang diberikan menjadi kekuatan terbesar bagi penulis.
2. Bapak Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, MT, IPU selaku Rektor Unismuh Makassar beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. bapak Dr.Andi Luhur Prianto,S.IP.,M.Si. atas segala arahan, dedikasi , serta kebijaksanaan yang diberikan kepada mahasiswa, termasuk penulis.
4. Dosen Pembimbing I bapak Dr. .Andi Luhur Prianto,S.IP.,M.Si dan Dosen Pembimbing II bapak Muhammad Randhy Akbar, S.IP.,M.Si, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan ketegasan telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Bapak Rudi Hardi, S,Sos.,M,SI dan sekretaris program studi ilmu pemerintahan ibu Nur Khaerah,S.IP.,M,IP , yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada seluruh mahasiswa , khususnya penulis.
6. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, atas segala ilmu pengetahuan, arahan dan wawasan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan di universitas Muhammadiyah makassar.
7. Keluarga Asrarudin dan keluarga Zainuddin Lamongan, yang telah memberikan doa, dukungan,nasehat, semangat, serta perhatian sehingga

menjadi bagian penting dalam penyelesaian perkuliahan penulis, hingga ke tahap akhir tugas skripsi penulis.

8. Terakhir, untuk diri sendiri, terimakasih atas usaha, ketekunan, dan kesabaran dalam menghadapi setiap tantangan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, bagi pembaca, serta pihak-pihak yang membutuhkan.

Makassar 26 Agustus 2025

Indra Parawansyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Konsep dan Teori.....	13
C. Kerangka Teori.....	18
D. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	23
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	23
C. Sumber Data.....	24
D. Informan Penelitian .....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Analisis Data .....	28
G. Keabsahan Data.....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. <u>Deskripsi Objek Penelitian.....</u>	<u>32</u>
B. <u>Hasil Penelitian.....</u>	<u>36</u>
C. <u>Pembahasan.....</u>	<u>77</u>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>98</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Gambar 2.2 Kerangka Pikir .....	22



## **DAFTAR TABEL**

Tabel Informan 2.1.....	24
-------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seiring bertambahnya kesadaran global terhadap urgensi menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. konsep *green economy* atau ekonomi hijau semakin menjadi sorotan dan menarik perhatian berbagai pihak, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Ekonomi hijau tidak hanya dipandang sebagai pendekatan alternatif untuk mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang kian kompleks, seperti perubahan iklim, degradasi lahan, pencemaran udara dan air, serta hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga sebagai suatu kerangka strategis yang mampu mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan (M. Anwar, 2022).

Green economy menekankan pentingnya pembangunan yang bersifat inklusif, yaitu memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Dalam konteks perkembangan ekonomi global yang menghadapi tantangan besar akibat eksploitasi sumber daya berlebihan, green economy hadir sebagai paradigma baru yang mengajak semua pemangku kepentingan pemerintah, sektor swasta, dan Masyarakat untuk berkolaborasi menciptakan sistem pembangunan yang ramah lingkungan dan berorientasi pada masa depan.

Ekonomi hijau atau *green economy* merupakan sebuah paradigma pembangunan ekonomi yang mengutamakan pengurangan risiko dan kerusakan

lingkungan sebagai prioritas utama. Konsep ini tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa proses pembangunan dilakukan secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, ekonomi hijau memandang pentingnya transformasi sistem ekonomi menuju model yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta minim menghasilkan dampak negatif terhadap ekosistem.

Di Indonesia, pembahasan mengenai *green economy* mulai dilakukan secara lebih serius sejak pelaksanaan Konferensi Rio+20 pada tahun 2012. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan komitmen resminya untuk mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau. Sejak saat itu, pemerintah menegaskan bahwa ekonomi hijau akan dijadikan salah satu pilar utama dalam strategi pertumbuhan jangka panjang, dengan tujuan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. (Widyaningrum, 2020). Pada tahun 2015, melalui komitmen COP21 (*Conference of the Parties* ke-21), disepakati Paris Agreement atau *Perjanjian Paris*, yakni kesepakatan global untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dengan menurunkan emisi gas rumah kaca serta membatasi kenaikan suhu bumi. Sejalan dengan kesepakatan tersebut, Indonesia semakin menegaskan komitmenya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *green economy* demi menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan (Hutajulu et al., 2024).

Pemerintah menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai prioritas utama, yang diarahkan untuk menjaga kelestarian alam melalui penerapan

ekonomi hijau. Komitmen ini tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif para pelaku industri. Setiap perusahaan didorong, bahkan diwajibkan, untuk memastikan bahwa proses produksi yang dijalankan memperhatikan keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan sumber daya alam, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan.

Konsep *green economy* juga telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas perencanaan pemerintah dan dimasukkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menetapkan tiga program utama yang menjadi fokus, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup, penguatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta penerapan pembangunan rendah karbon (Ginting, 2024). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 merupakan dokumen perencanaan nasional yang menjadi pedoman pembangunan Indonesia dalam lima tahun. Dalam periode ini, untuk pertama kalinya konsep *green economy* secara resmi dimasukkan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, dan salah satu Perusahaan yang menerapkan perencanaan konsep *green economy* yaitu PT VALE INDONESIA. perencanaan ini di terapkan pada tahun 2023. Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi dan investasi, tetapi juga oleh keberlanjutan lingkungan serta efisiensi sumber daya.

Riset terdahulu mengenai *green economy* di indonesia, salah satunya

dalam jurnal *“Penerapan Green Economy Dalam Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Pada PT MHE Demag Indonesia”*. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh suatu Perusahaan sangat berdampak pada Kesehatan lingkungan sekitar, Dampak pencemaran lingkungan terhadap ekonomi seperti menurunnya pendapatan nelayan disebabkan oleh banyaknya ikan yang mati membusuk karena tercemar limbah industri yang masuk ke perairan, Banjir yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan, seperti limbah industri, dapat mengakibatkan gagal panen dan kerusakan lahan pertanian, dan Pencemaran udara (Bakri et al., 2023). Seperti kabupaten lainnya, Morowali juga memiliki berbagai permasalahan yang serupa mengenai pengelolaan sumber daya alam seperti kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh Perusahaan Pertambangan (Najicha, 2021).

Kabupaten Morowali, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, telah berkembang menjadi salah satu pusat industri pertambangan terbesar di Indonesia. terutama dalam pengelolaan nikel, salah satu Perusahaan pertambangan pengelolaan nikel yaitu PT.VALE IGP Morowali. Dengan memiliki kekayaan sumber daya alam, Morowali menjadi tulang punggung ekspor nikel Indonesia, yang banyak digunakan dalam industri baja tahan karat dan baterai kendaraan Listrik (Botutihe & Paksi, 2024). Pertumbuhan ekonomi yang pesat akibat ekspansi industri ini membawa dampak signifikan bagi masyarakat sekitar, baik dalam bentuk peningkatan lapangan kerja maupun pembangunan infrastruktur. Namun, di balik perkembangan ekonomi yang pesat, Morowali juga menghadapi berbagai masalah lingkungan yang

signifikan.

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat di sekitar kawasan PT. VALE IGP Morowali berkaitan dengan aktivitas eksplorasi dan penambangan, khususnya nikel, yang memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Kegiatan ini memicu degradasi lingkungan seperti deforestasi dan kerusakan ekosistem. Lahan yang mengalami degradasi kehilangan fungsi ekologisnya, termasuk kemampuan menyerap air hujan, menjaga keanekaragaman hayati, serta sering kali meninggalkan lahan kritis yang memerlukan upaya rehabilitasi untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem. Selain itu, di kawasan ini polusi air Sungai, udara menjadi masalah yang signifikan. akibat limbah cair dan emisi debu dari aktivitas tambang. Limbah cair dapat mencemari sungai dan sumber air yang menjadi penopang hidup masyarakat sekitar, sementara debu dan emisi gas dari proses penambangan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan bagi penduduk lokal (Sarie et al., 2023).

Selain masalah lingkungan, keberadaan industri tambang di Morowali juga membawa perubahan sosial yang kompleks. Masuknya ribuan tenaga kerja dari berbagai daerah, termasuk tenaga kerja asing, menciptakan dinamika sosial baru yang menuntut penyesuaian dalam kehidupan masyarakat setempat. Kesenjangan ekonomi antara tenaga kerja di sektor industri dan masyarakat lokal yang belum merasakan manfaat maksimal dari pertumbuhan tersebut menjadi tantangan yang cukup besar. Sejumlah kelompok, seperti nelayan dan petani, menghadapi hambatan dalam mempertahankan mata pencaharian mereka akibat terjadinya alih fungsi lahan serta adanya pencemaran lingkungan.

Dalam hal ini Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul akibat aktivitas pertambangan di Kabupaten Morowali. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang mengatur eksplorasi sumber daya alam diterapkan dengan ketat dan diawasi secara efektif.

Dalam hal ini, Tata Kelola Kolaboratif berperan sebagai pendekatan strategis yang melibatkan berbagai pihak pemerintah, perusahaan, masyarakat lokal, untuk bersama-sama mengelola kawasan pertambangan dengan memprioritaskan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah memiliki fungsi utama sebagai regulator yang menetapkan kebijakan dan regulasi terkait lingkungan serta pengelolaan industri pertambangan. Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan serta mendorong inovasi dalam teknologi berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis keberlanjutan, pemerintah dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di Morowali. Perusahaan memegang tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional pertambangan yang dijalankan sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan serta mematuhi regulasi yang berlaku. Perusahaan juga menjadi kunci untuk mewujudkan *green economy* melalui program-program yang bermanfaat bagi Masyarakat lokal.

Tata kelola kolaboratif menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa industri pertambangan berjalan seimbang dengan prinsip *green*

*economy*. *Green economy* menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Karena itu, partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam tata kelola pertambangan PT Vale menjadi faktor penting untuk mewujudkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan upaya pelestarian lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau, PT Vale dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan kerja, diversifikasi sektor ekonomi, serta pembangunan infrastruktur sosial. Hal ini memastikan bahwa manfaat ekonomi dari kegiatan tambang dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat setempat.

Dengan adanya penelitian ini berupaya menjawab masalah lingkungan dalam mewujudkan *green economy* di Kawasan PT VALE IGP Morowali, khususnya di sektor pertambangan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam konteks PT VALE IGP Morowali, aktivitas industri pertambangan tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga membawa konsekuensi terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana Tata kelola kolaboratif dapat menjadi solusi dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui keterlibatan berbagai aktor, termasuk pemerintah, perusahaan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti akan merumuskan suatu pokok masalah yaitu: Bagimana penerapan *tata kelola kolaboratif* dalam mewujudkan green economy di Kawasan PT VALE IGP MOROWALI?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah berdasarkan rumusan masalah, berikut tujuan dari penelitian untuk mengetahui penerapan *Tata kelola kolaboratif* dalam mewujudkan *green economy* di Kawasan PT VALE IGP MOROWALI.

### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Kegunaan teoritis :

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tata kelola kolaboratif, khususnya dalam konteks pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Studi ini akan memperluas pemahaman tentang bagaimana kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menciptakan sinergi untuk mencapai tujuan green economy yang selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

#### 2. Kegunaan praktis:

a. Bagi peneliti : secara praktis, hasil penelitian ini memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang konsep tata kelola kolaboratif, *green economy*, dalam konteks pertambangan. Selain itu,

penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan landasan untuk studi lebih lanjut mengenai tata kelola berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

- b. Bagi instansi : hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan yang mendorong kerjasama antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan pihak lain. Penelitian ini juga membantu pemerintah dalam meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas industri, khususnya yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan.
- c. Bagi perusahaan : penelitian ini menawarkan panduan untuk meningkatkan efektivitas program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan implementasi strategi *green economy* yang sejalan. Dengan mengadopsi hasil penelitian ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat keberlanjutan bisnis, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat di Kawasan pertambangan. Hal ini juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya.
- d. Bagi Masyarakat : penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman dan keterlibatan dalam proses Tata kelola kolaboratif. Masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam program-program yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan industri.

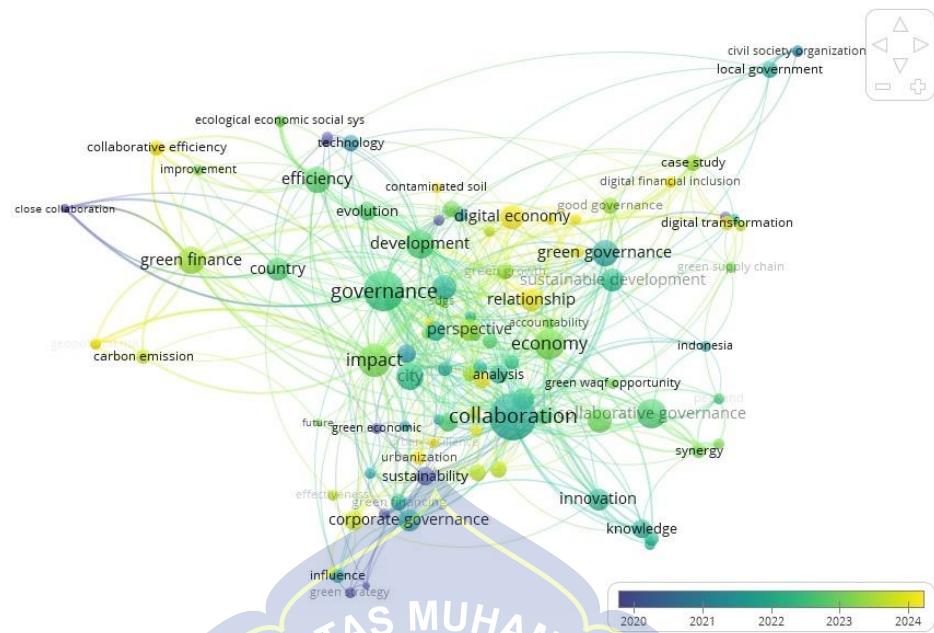
## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka untuk mendukung komponen penting dari penelitian yang membantu membangun dasar pengetahuan yang kuat, menghubungkan penelitian yang sedang dilakukan dengan konteks yang lebih luas, dan menegaskan relevansi serta kontribusi penelitian tersebut terhadap bidang studi yang lebih besar.

Sebagaimana penelitian peneliti menggunakan beberapa referensi penelitian sebelumnya yang mendekati ruang lingkup dengan tujuan membandingkan informasi yang ditemukan dan melengkapi penulisan, dalam rangka untuk melihat sisi kebaruan dari penelitian ini, penulis menggunakan software di PC/laptop bernama Vosviewer. Vosviewer merupakan software untuk visualisasi dari penulisan-penulisan terdahulu. Adapun metode dilalui yaitu memanfaatkan Software Publish or Perish untuk mencari referensi penulisan-penulisan terdahulu yang relevan dengan penulisan penulis, semua referensi tersebut disimpan berbentuk ris manager. Lanjut, data ris tersebut dimasukkan dalam Vosviewer, secara singkat kemudian seleksi kata-kata yang penting dan buang kata tidak penting untuk penulisan. Penulisan penulis ini menggunakan Network Vizualisation, sebagai berikut.



*Gambar 2.1 ( Penelitian Terdahulu )*  
Sumber : Diolah melalui aplikasi VOSviewer, 2024

Pada kata kunci *collaborative governance* dan *green economy* didapatkan tema penelitian yang sering muncul, yaitu *governance*, *corporate governance*, *sustainability*, dan *synergy*. Sementara itu untuk tema penelitian yang paling banyak bertautan dengan tema penelitian lain yaitu, *green finance*, *carbon emission*, *efficiency*, dan *innovation*.

Visualisasi hasil analisis data menggunakan VOSviewer ini menunjukkan jaringan hubungan antara berbagai konsep yang terkait dengan tata kelola (*governance*), ekonomi hijau (*green economy*), dan kolaborasi dalam pembangunan berkelanjutan. Dari gambar ini, dapat dilihat bahwa beberapa kata kunci memiliki peran sentral dalam diskusi akademik atau penelitian yang dianalisis, dengan "*governance*," "*collaboration*," dan "*impact*" menjadi node utama yang memiliki banyak koneksi ke konsep-konsep lainnya.

Kata kunci "*governance*" menempati posisi strategis dalam jaringan,

yang menunjukkan bahwa isu tata kelola merupakan aspek fundamental dalam penelitian terkait pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Hal ini diperkuat dengan keterkaitannya dengan konsep seperti "*green governance*," "*corporate governance*," dan "*sustainable development*," yang menandakan bahwa pendekatan tata kelola yang berkelanjutan semakin mendapatkan perhatian dalam kajian ilmiah. Selain itu, adanya koneksi dengan istilah seperti "*digital economy*" dan "*digital transformation*" menunjukkan bahwa tata kelola di era modern juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital. Sementara itu, konsep "*collaboration*" juga muncul sebagai salah satu aspek utama dalam diskusi ini, menegaskan pentingnya kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Hubungan erat antara "*collaboration*" dan konsep lain seperti "*corporate governance*," "*green finance*," serta "*innovation*" mengindikasikan bahwa penelitian di bidang ini semakin menyoroti bagaimana sektor publik dan swasta dapat bersinergi dalam mewujudkan ekonomi hijau dan tata kelola yang baik.

Berdasarkan riset penelitian terdahulu yang menyoroti mengenai green economy, seperti "*green economy sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral*". Penelitian sebelumnya tentang ekonomi hijau memiliki cakupan yang luas dengan fokus pada dampaknya terhadap pemulihian ekonomi nasional serta mitigasi masalah lingkungan dan sosial. Penelitian tersebut kurang spesifik dalam mengkaji bagaimana konsep ekonomi hijau diterapkan dalam suatu sektor industri atau wilayah tertentu, sehingga

analisisnya lebih bersifat konseptual daripada aplikatif. Selain itu, penelitian ini tidak secara mendalam membahas peran berbagai pemangku kepentingan dalam implementasi ekonomi hijau. Aspek kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat yang menjadi kunci keberhasilan konsep ini tidak banyak dieksplorasi, sehingga kurang memberikan gambaran tentang tantangan nyata di lapangan.

Sebaliknya, penelitian saya lebih terfokus dan aplikatif dengan mengambil studi kasus di kawasan PT VALE IGP Morowali. Dalam penelitian ini, ekonomi hijau tidak hanya dibahas sebagai konsep teoritis, tetapi juga dianalisis dalam konteks konkret industri pertambangan, termasuk bagaimana tata kelola kolaboratif menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga lebih komprehensif karena mempertimbangkan keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi ekonomi hijau serta tantangan yang dihadapi di tingkat lokal.

## B. Konsep dan Teori

### 1. Pengertian Tata Kelola Kolaboratif

Tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) adalah suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di mana pemerintah menggandeng aktor non-pemerintah, seperti sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, komunitas, dan kelompok masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan implementasi program publik. Model ini muncul sebagai respons atas

keterbatasan pendekatan pemerintahan tradisional yang bersifat hierarkis (top-down), karena banyak masalah publik yang bersifat kompleks dan multidimensional tidak lagi dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah sendiri. Melalui tata kelola kolaboratif, penyelesaian masalah dibangun atas dasar kemitraan lintas-sektor dan partisipasi yang setara.

Dalam teori *Collaborative Governance* Ansell & Gash (2008), *collaborative process* merupakan “jantung” atau inti dinamika kolaborasi karena berlangsung secara terus-menerus, siklikal, dan menjadi ruang terbentuknya kerjasama antar-aktor. *Collaborative process* menggambarkan bagaimana interaksi antar pelaku negara (pemerintah) dan non-negara (swasta, masyarakat) dibangun dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan publik secara kolaboratif.

Ansell & Gash merinci *Collaborative process* ke dalam lima indikator utama, yakni:

1. Face-to-Face Dialogue (Dialog Tatap Muka)

Pertemuan langsung menjadi sarana untuk membangun interaksi yang terbuka, egaliter, dan deliberatif. Melalui dialog tatap muka, aktor dapat saling menyampaikan aspirasi, menjelaskan kepentingannya, menegosiasikan perbedaan, serta menciptakan hubungan interpersonal yang hangat sebagai dasar kolaborasi.

2. Trust Building (Membangun Kepercayaan)

Kepercayaan dibangun melalui interaksi berulang, transparansi, dan konsistensi tindakan antar pihak. Trust menjadi modal sosial penting agar

para pelaku berani berbagi informasi, menerima kompromi, dan berkomitmen dalam proses kolaboratif jangka panjang.

### 3. Commitment to the Process (Komitmen terhadap Proses)

Ditunjukkan melalui kesediaan masing-masing pihak untuk terus aktif terlibat dalam forum, mengalokasikan waktu dan sumber daya, serta bertahan sekalipun menghadapi konflik atau ketidakpastian. Komitmen adalah sinyal keseriusan mempertahankan kolaborasi.

### 4. Shared Understanding (Pemahaman Bersama)

Mengacu pada kesepahaman tentang tujuan kolaborasi, masalah yang hendak diselesaikan, serta peran dan tanggung jawab masing-masing aktor. Shared understanding mencegah salah persepsi dan memastikan arah kolaborasi tetap fokus pada tujuan kolaboratif.

### 5. Intermediate Outcomes (Hasil Antara)

Hasil antara merupakan capaian awal yang menunjukkan progres keberhasilan kolaborasi. Intermediate outcomes berfungsi sebagai indikator bahwa kolaborasi berada di jalur yang benar, serta menjadi sumber motivasi dan legitimasi politik untuk melanjutkan proses kolaboratif menuju capaian yang lebih besar.

Tujuan pokok dari tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) adalah mewujudkan kebijakan dan solusi publik yang lebih efektif, memiliki legitimasi yang kuat, bersifat inklusif, dan berkelanjutan melalui sinergi antara berbagai aktor, baik pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, maupun komunitas lokal. Pendekatan ini menempatkan

semua pemangku kepentingan utama dalam posisi yang memungkinkan mereka terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, perumusan strategi, serta pelaksanaan program. Dengan melibatkan para pihak yang terdampak dan berkepentingan sejak tahap perencanaan hingga implementasi, tata kelola kolaboratif berupaya memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga benar-benar relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di lapangan.

## 2. Pengertian *Green Economy*

*Green economy* merupakan konsep ekonomi yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan dengan menggabungkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan sosial secara terpadu (Wahida & Uyun, 2023). Dalam pendekatan ini, *green economy* bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Secara sederhana, pengertian ekonomi hijau dirumuskan sebagai kegiatan perekonomian yang tidak merugikan atau merusak lingkungan.

Sementara itu, *United Nation Environment Programme (UNEP)* mengaitkan pengertian ekonomi hijau dengan makna ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial, dengan memberikan pengertian bahwa : "*Greening the economy refers to the process of reconfiguring business and infrastructure to deliver better returns on natural, human and economic capital investments, while at the same time*

*reducing greenhouse gas emissions, extracting and using less natural resources, creating less waste and reducing social disparities." (Mas et al., 2024).*

Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam mewujudkan green economy yaitu:

a. Keberlanjutan Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan bertujuan untuk melestarikan alam dengan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Prioritas utamanya mencakup pemanfaatan sumber daya secara efisien, penurunan emisi karbon, pengelolaan limbah yang tepat, serta peralihan menuju penggunaan energi terbarukan. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, kelestarian ekosistem dapat terjaga bagi generasi mendatang, sehingga pemanfaatan sumber daya alam berlangsung secara berkesinambungan.

b. Keadilan Sosial

Keadilan sosial bertujuan memastikan bahwa pembangunan ekonomi hijau dapat memberikan manfaat secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan. Hal ini meliputi penyediaan kesempatan kerja yang inklusif, pemerataan akses terhadap sumber daya, serta penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan ini, ekonomi hijau berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan peluang yang setara bagi semua pihak untuk terlibat dalam ekonomi yang berkelanjutan.

### c. Kemakmuran Ekonomi

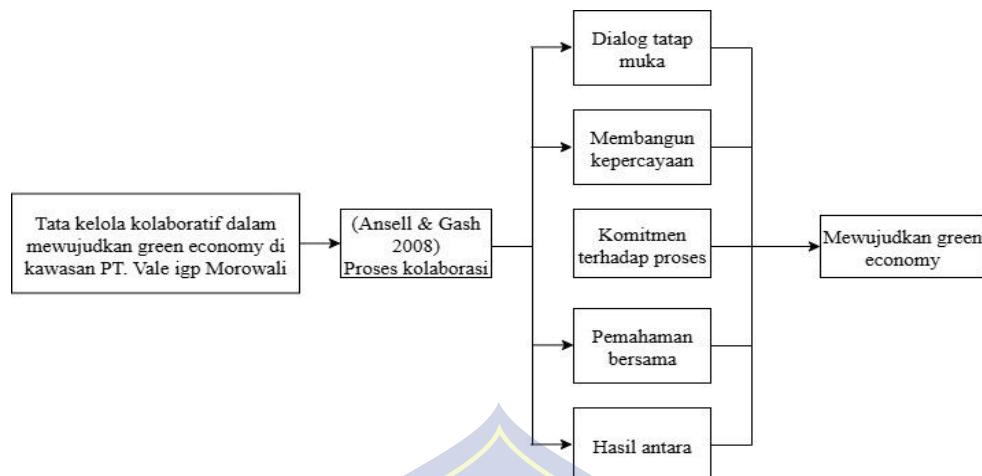
Kemakmuran ekonomi mengarah pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tanpa merusak lingkungan. Fokusnya adalah mengembangkan sektor-sektor hijau seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan transportasi ramah lingkungan. berusaha menciptakan lapangan kerja hijau dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan, yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi perekonomian.

Dengan demikian, green economy atau ekonomi hijau adalah bentuk kegiatan ekonomi yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran utama, tetapi juga diharapkan mampu mewujudkan keadilan, baik bagi manusia maupun bagi lingkungan dan sumber daya alam. Falsafah ekonomi hijau menekankan adanya keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keadilan sosial, sambil tetap berupaya meminimalkan risiko kerusakan lingkungan serta degradasi ekosistem. Dalam hal inilah esensi ekonomi hijau sebagai model pembangunan ekonomi yang berbasis pembangunan berkelanjutan.

## C. Kerangka Teori

Kerangka pikir dalam penelitian ini berperan sebagai peta konseptual yang menjelaskan alur logis dari penelitian. Kerangka pikir adalah model yang meggambarkan bagaimana hubungan teori yang satu dengan yang lainnya. Yang menjelaskan tentang masalah yang ada, dan kerangka pikir akan

menghubungkan antara variabel mana saja yang terkait. i



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

#### D. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, yaitu mengeksplorasi bagaimana pendekatan tata kelola kolaboratif dapat mendukung terciptanya ekonomi hijau, dengan studi kasus di kawasan PT Vale IGP MOROWALI. Fokus penelitian ini mencakup identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap interaksi berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, perusahaan, masyarakat lokal dalam upaya bersama untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan tata kelola kolaboratif menjadi inti penelitian, dengan menyoroti proses pengambilan keputusan bersama, pembagian tanggung jawab, serta dinamika yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya di kawasan tersebut.

Deskripsi Fokus penelitian ini adalah :

1. Dialog tatap muka

Dialog tatap muka merupakan proses interaksi langsung antara para aktor yang terlibat dalam kolaborasi, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dialog ini penting untuk membangun komunikasi yang terbuka, saling memahami posisi masing-masing, serta menciptakan ruang diskusi yang partisipatif dan setara. PT Vale, sebagai pelaku utama industri di kawasan tersebut, secara periodik melibatkan masyarakat melalui konsultasi publik, forum multi-stakeholder, dan diskusi terbuka mengenai dampak tambang dan program keberlanjutan. Dialog ini menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, memperbaiki kebijakan, dan menyamakan persepsi mengenai arah pengembangan kawasan berbasis ekonomi hijau.

## 2. Membangun kepercayaan

Adalah proses membangun rasa saling percaya antar pihak yang sebelumnya mungkin memiliki relasi yang tidak setara, penuh konflik, atau curiga satu sama lain. Kepercayaan dibentuk melalui transparansi, konsistensi tindakan, dan komitmen terhadap kesepakatan bersama. Tanpa kepercayaan, kolaborasi cenderung gagal karena aktor tidak merasa aman untuk berbagi informasi atau berkompromi. PT Vale dapat memperkuat kepercayaan melalui keterbukaan data lingkungan, pelibatan warga dalam program pemantauan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program yang berorientasi pada pemulihan ekologis dan ekonomi hijau. Kepercayaan juga terbentuk ketika perusahaan menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap nilai-nilai keberlanjutan.

## 3. Komitmen terhadap proses

Mengacu pada kesediaan para pihak untuk terlibat secara aktif dan

berkelanjutan dalam proses kolaborasi. Komitmen ini mencakup kehadiran dalam forum, konsistensi menjalankan peran, serta kemauan menyelesaikan konflik dan tantangan bersama. Komitmen yang kuat menunjukkan bahwa aktor tidak hanya terlibat secara formal, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap hasil Bersama pada program dalam mewujudkan green economy. PT Vale, misalnya, menunjukkan komitmennya dengan mengembangkan program dekarbonisasi, reklamasi lahan pasca tambang, dan pengembangan energi terbarukan, yang semuanya membutuhkan partisipasi lintas sektor.

#### 4. Pemahaman Bersama

Merupakan kesepakatan kolektif mengenai tujuan, nilai, masalah, dan strategi yang akan diambil dalam kolaborasi. Pemahaman ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pihak, terutama jika memiliki latar belakang atau kepentingan yang berbeda. mengenai arti dan tujuan green economy sangat penting agar setiap pihak bekerja dalam satu arah. Dalam hal ini, tujuan green economy mencakup pada 3 aspek yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Upaya membangun pemahaman bersama ini dapat difasilitasi melalui pelatihan, workshop, dan forum interaktif lintas aktor.

#### 5. Hasil Antara

Hasil antara merujuk pada pencapaian-pencapaian sementara yang muncul selama proses kolaborasi antar pemangku kepentingan, seperti terbentuknya kesepahaman bersama, peningkatan kepercayaan, atau komitmen awal terhadap tujuan bersama. dalam upaya mewujudkan prinsip *green economy* di kawasan industri PT Vale IGP Morowali, keberadaan hasil-hasil antara ini menjadi sangat

krusial. Hal ini dikarenakan transformasi menuju ekonomi hijau bukanlah proses instan, melainkan tahapan jangka panjang yang membutuhkan komitmen bertahap dari berbagai pihak.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan setelah seminar proposal. Adapun lokasi penelitian sesuai dengan judul yang sudah ditetapkan, penelitian ini dilakukan di Kawasan PT VALE IGP MOROWALI, Sulawesi Tengah. Lokasi ini dipilih karena relevansi langsung dengan tema *green economy* dan *Tata Kelola kolaboratif*, mengingat aktivitas tambang yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat. Morowali juga menjadi contoh penting dalam penerapan teknologi era industri 4.0 di sektor tambang, menjadikannya tempat ideal untuk mengevaluasi bagaimana teknologi tersebut diterapkan dalam mendukung tata kelola dan keberlanjutan.

#### **B. Jenis Dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena secara mendalam dan menyeluruh melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan naratif(Fadli, 2021). Tujuan utamanya adalah untuk menggali proses, dinamika, serta interaksi yang terjadi antara berbagai pemangku kepentingan dalam penerapan tata kelola kolaboratif dan bagaimana itu berkontribusi pada penerapan *green economy* di kawasan PT Vale Igp

Morowali.

Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha memahami bagaimana aktor-aktor yang terlibat (pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah) berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama untuk mendukung *green economy* atau ekonomi hijau. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen adalah bagian dari pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali pengalaman dan persepsi aktor-aktor terkait.

## 2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif, Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan situasi atau fenomena yang ada tanpa mempengaruhi atau mengubah kondisi yang sedang diamati(Ramdhani, 2021). Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara rinci bagaimana proses Tata Kelola Kolaboratif terjadi di PT Vale Morowali, bagaimana pemangku kepentingan berkolaborasi, dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip *green economy* dalam industri pertambangan tersebut. Penelitian ini akan menggali praktik-praktik tata kelola yang diterapkan dan hasil-hasil yang dicapai melalui kolaborasi berbagai pihak.

## C. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui interaksi langsung dengan para pihak yang terlibat dalam penelitian(Wahidmurni, 2017). Dalam konteks ini, data primer dikumpulkan

melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah, manajemen PT Vale, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah. Tujuan dari wawancara ini adalah menggali pengalaman, pandangan, tantangan, dan peran masing-masing aktor dalam pelaksanaan tata kelola kolaboratif serta upaya untuk mewujudkan *green economy*. Selain itu, observasi langsung juga digunakan untuk memahami bagaimana kolaborasi terjadi di lapangan, termasuk praktik-praktik tata kelola dan implementasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi, seperti kebijakan pemerintah terkait *green economy*, laporan keberlanjutan PT Vale, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Literatur ilmiah, seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian sebelumnya, juga digunakan untuk memberikan kerangka teoritis dan membandingkan temuan penelitian ini dengan studi yang telah ada. Selain itu, data statistik mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas pertambangan di Kabupaten Morowali memberikan konteks kuantitatif yang mendukung analisis kualitatif. Media massa, seperti laporan berita dan artikel, juga menjadi sumber penting untuk memahami narasi publik dan isu-isu yang berkembang di sekitar kawasan PT Vale Igp Morowali.

#### **D. Informan Penelitian**

Penelitian ini akan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam konteks Tata telola kolaboratif dalam mewujudkan *green economy* di Kabupaten Morowali Kec. Bungku Timur. Kategori informan yang

akan dilibatkan langsung ini mencakup dengan fokus penelitian, Tata telola kolaboratif dalam mewujudkan *green economy* era di Kawasan PT VALE IGP MOROWALI. yaitu:

No	Informan	Instansi	Jumlah
1	Alamsyah	External PT. VALE IGP Morowali	1
2	Lahmuddin Lahasa	Pemerintah kecamatan bungku timur	1
3	Asnan As'ad Warham Safran hani	Pemerintah Desa Geresa Pemerintah Desa Kolono Pemerintah Desa Bahomotefe	3
4	Yusuf Harsono Hamlan miftah	Masyarakat lokal	4

Dengan melibatkan berbagai kelompok informan, penelitian ini berupaya mendapatkan pandangan yang komprehensif dan mendalam mengenai Tata telola kolaboratif dalam mewujudkan *green economy*. Informasi yang diperoleh dari berbagai perspektif ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena secara lebih kaya dan menyeluruh, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Tata kelola kolaboratif dalam mewujudkan *green economy* di Kawasan PT VALE IGP MOROWALI.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Dengan menggunakan metode wawancara mendalam menjadi salah satu teknik utama dalam pengumpulan data(Anufia & Alhamid, 2019). Teknik ini dilakukan dengan berbicara langsung kepada berbagai aktor yang

terlibat dalam tata kelola kolaboratif di kawasan PT Vale, seperti perwakilan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi oleh para pihak dalam upaya bersama untuk mewujudkan *green economy*. Wawancara ini juga memberikan peluang bagi peneliti untuk memahami lebih dalam persepsi dan hubungan antar aktor, yang seringkali tidak dapat ditangkap melalui data sekunder.

## 2. Observasi

Observasi langsung juga menjadi suatu hal yang penting digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memahami situasi di lapangan. Peneliti mengamati secara langsung bagaimana kolaborasi berlangsung dalam praktik, seperti pelaksanaan program-program keberlanjutan, atau penggunaan teknologi berbasis industri 4.0 dalam mendukung *green economy*. Teknik ini memungkinkan peneliti menangkap dinamika yang terjadi di lapangan dengan detail dari proses kolaborasi.

## 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan melakukan dokumentasi menjadi teknik penting dalam pengumpulan data sekunder. Dokumen-dokumen resmi, seperti laporan keberlanjutan PT Vale Igp Morowali, kebijakan pemerintah tentang *green economy*, dan dokumen regulasi terkait, dianalisis untuk memahami kerangka kerja yang mendasari kolaborasi dan keberlanjutan di kawasan tersebut. Dokumen ini juga membantu

memberikan konteks historis dan normatif yang relevan dengan penelitian. Media massa, artikel jurnal, dan data statistik dari badan pemerintah atau organisasi internasional juga digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

### **1. Reduksi Data**

Dalam Teknik analisis data reduksi data menjadi suatu hal yang penting di gunakan, di mana data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumen dianalisis untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk memfokuskan data pada elemen penting dari *green economy* seperti peran masing-masing aktor dan tantangan kolaborasi, di Kawasan industri PT VALE IGP MOROWALI. Proses ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian, sehingga hanya data yang signifikan yang dipertahankan untuk analisis lebih lanjut.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, diagram, atau peta konsep untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi hubungan dan pola di antara elemen-elemen yang diteliti. Pada tahap ini, peneliti mulai mengidentifikasi bagaimana kolaborasi terjadi, siapa saja aktor yang terlibat, serta bagaimana proses kolaborasi ini dapat mewujudkan *green economy*.

### **3. Kesimpulan dan Verifikasi**

Peneliti menggunakan temuan yang telah diorganisir dan dianalisis

untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Kesimpulan ini didasarkan pada data yang telah diverifikasi melalui triangulasi, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber data (wawancara, observasi, dan dokumen) untuk memastikan konsistensi dan validitas. Triangulasi juga membantu mengurangi bias dan meningkatkan keandalan hasil penelitian.

Teknik analisis ini bersifat iteratif, artinya peneliti terus melakukan proses reduksi, penyajian, dan verifikasi data secara berulang hingga temuan-temuan penelitian terformulasi dengan jelas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai peran Tata telola kolaboratif dalam mewujudkan *green economy* di kawasan PT Vale Morowali, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan atau tantangan yang dihadapi dalam konteks tersebut.

## **G. Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi yang meliputi :

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan melibatkan berbagai aktor utama yang memiliki peran langsung dalam tata kelola kolaboratif di Kawasan PT Vale IGP Morowali. Informan yang dipilih berasal dari berbagai latar belakang, seperti perwakilan PT Vale, pemerintah kecamatan Bungku Timur, pemerintah desa, serta masyarakat lokal dari desa-desa terdampak.

Dengan membandingkan informasi yang diberikan oleh masing-masing informan, peneliti dapat menguji konsistensi pandangan dan pengalaman mereka terkait pelaksanaan program berbasis green economy. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan objektif terhadap dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik diterapkan melalui penggunaan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan subjektif dan pengalaman para aktor secara mendalam. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana proses kolaborasi berlangsung di lapangan, seperti pelaksanaan program restorasi ekosistem atau forum musyawarah desa. Sementara itu, dokumentasi dianalisis untuk memperoleh data sekunder yang relevan, seperti laporan keberlanjutan PT Vale, regulasi pemerintah terkait green economy, serta berita atau artikel yang mendukung konteks penelitian. Kombinasi ketiga teknik ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai proses tata kelola kolaboratif yang diteliti.

## 3. Triangulasi Waktu

Peneliti juga menerapkan triangulasi waktu, yaitu dengan melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi dalam kurun waktu tertentu. Proses ini dilakukan selama periode pelaksanaan program, baik pada saat perencanaan, implementasi, maupun

evaluasi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengamati perubahan dinamika hubungan antar aktor serta mengevaluasi komitmen dan keberlanjutan program yang dijalankan dalam jangka waktu tertentu. Triangulasi waktu juga membantu untuk menangkap perubahan persepsi dan respon masyarakat terhadap program-program PT Vale yang berlangsung secara bertahap.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Deskripsi Tata Kelola Kolaboratif**

Tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) merupakan pendekatan pengelolaan dan pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor dari lintas sektor secara aktif dan setara dalam proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan atau program. Pendekatan ini lahir sebagai respons atas kompleksitas masalah-masalah publik yang tidak bisa diselesaikan secara efektif hanya oleh pemerintah atau sektor tertentu saja. Dalam tata kelola kolaboratif, aktor-aktor yang terlibat dalam penelitian ini seperti pihak Perusahaan dalam hal ini PT. Vale igp Morowali, pemerintah kecamatan bungku timur, pemerintah desa, masyarakat lokal. bersama dalam forum yang terbuka, transparan, dan partisipatif untuk membangun tujuan yang ingin di capai dan solusi bersama.

Prinsip utama dari tata kelola kolaboratif adalah kesetaraan, kepercayaan, komunikasi terbuka, dan saling menghormati peran serta kontribusi hingga komitmen masing-masing pihak. Semua aktor berbagi tanggung jawab, informasi, dan sumber daya demi mencapai tujuan yang disepakati bersama. Dalam praktiknya, tata kelola kolaboratif sering digunakan untuk menyelesaikan isu-isu seperti pengelolaan sumber daya alam, perubahan iklim, kesehatan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang kuat, bukan hanya efektivitas kebijakan yang meningkat, tetapi juga legitimasi sosial dari kebijakan tersebut akan

lebih diterima oleh masyarakat.

Pendekatan ini menjadi sangat relevan terutama di wilayah-wilayah yang menghadapi tantangan besar seperti eksploitasi sumber daya alam yang intensif, termasuk daerah pertambangan. Ketika masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan perusahaan bisa duduk bersama menyusun program yang inklusif dan adil, maka potensi konflik dapat diminimalkan, dan pembangunan yang terjadi lebih berkelanjutan. Dengan demikian, tata kelola kolaboratif tidak hanya soal kerja sama teknis, tetapi juga membangun relasi sosial dan politik yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan jangka panjang.

## 2. Deskripsi Green Economy

*Green economy* atau ekonomi hijau adalah konsep pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Konsep ini muncul sebagai solusi terhadap model pembangunan konvensional yang sering mengabaikan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Dalam *green economy*, pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan cara yang rendah emisi karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya alam, serta inklusif terhadap kelompok rentan dan masyarakat lokal.

Di Indonesia, *green economy* telah menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. Pemerintah melalui Bappenas telah meluncurkan *Green Economy Index (GEI)* untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan program pembangunan nasional maupun daerah telah memenuhi prinsip keberlanjutan. Kebijakan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari energi terbarukan, pengelolaan sampah, pertanian organik, perhutanan sosial, hingga industri ramah lingkungan.

Pemerintah juga bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga internasional untuk mendorong investasi hijau yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Implementasi ekonomi hijau di sektor pertambangan seperti di Morowali menjadi tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, industri tambang memiliki potensi besar menghasilkan emisi dan kerusakan lingkungan. Namun, dengan adopsi teknologi bersih, sistem pengelolaan limbah yang ketat, dan program keberlanjutan di Kawasan pertambangan , industri ini dapat diarahkan menjadi lebih hijau.

### 3. Gambaran Umum PT Vale igp Morowali

PT.Vale Indonesia Tbk adalah perusahaan tambang nikel yang telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari lima dekade, dan saat ini menjadi bagian dari holding BUMN tambang MIND ID. Proyek besar yang sedang dikembangkan perusahaan adalah Indonesia Growth Project Morowali, yang berlokasi di Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Proyek ini merupakan investasi strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi nikel nasional dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.

IGP Morowali dirancang sebagai proyek pertambangan dan pengolahan nikel terintegrasi dengan teknologi *Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF)*, yang didukung oleh pembangkit listrik tenaga gas berbasis LNG sebesar 500 MW. Proyek ini diperkirakan akan memproduksi hingga 73.000 ton nikel per tahun dan menjadi salah satu fasilitas pengolahan nikel dengan emisi karbon terendah di Indonesia. Komitmen Vale terhadap prinsip lingkungan tercermin dari strategi dekarbonisasi

mereka yang menargetkan penurunan emisi karbon sebesar 33% pada tahun 2030 dan mencapai net zero emission pada tahun 2050.

Selain aspek teknologi dan lingkungan, PT Vale juga mengembangkan pendekatan sosial yang kuat. Melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) hingga program-program yang mendukung keberlanjutan *green economy*, perusahaan menjalankan berbagai kegiatan seperti pengembangan pertanian sri organik (*System of Rice Intensification SRI*), penguatan kapasitas fasilitator lokal, pembinaan UMKM (usaha mikro kecil menengah), hingga pendidikan dan kesehatan masyarakat. Hingga 2024, perusahaan telah mengalokasikan dana PPM sebesar Rp63 miliar, yang mencerminkan komitmen nyata untuk menjadikan proyek tambang ini bukan hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, PT Vale igp Morowali menerapkan tata kelola kolaboratif dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan pembangunan yang inklusif.

#### 4. Gambaran Umum Kecamatan Bungku Timur

Kecamatan Bungku Timur merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, yang terbentuk melalui pemekaran wilayah pada tahun 2011. Kecamatan ini memiliki pusat pemerintahan yang terletak di Desa Kolono dan terdiri atas 10 desa. Bungku Timur memiliki posisi yang strategis karena menjadi lokasi pengembangan kawasan industri pertambangan, khususnya proyek tambang dan pengolahan nikel yang dikelola oleh PT Vale Indonesia Tbk dalam proyek *Indonesia Growth Project (IGP)* Morowali.

Keberadaan proyek ini menjadikan Bungku Timur sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi penting di wilayah Kabupaten Morowali.

Wilayah Bungku Timur memiliki luas sekitar 387,23 kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000 jiwa. Kepadatan penduduknya masih tergolong rendah, karena wilayahnya sebagian besar merupakan hutan produksi, area pertambangan, dan lahan pertanian. Komposisi sosial masyarakatnya didominasi oleh suku Bungku, dengan bahasa Bungku sebagai bahasa lokal, dan mayoritas penduduk menganut agama Islam.

Aktivitas utama ekonomi masyarakat lokal sebagian besar masih bergerak di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pekerjaan informal lainnya. Namun, sejak masuknya investasi tambang berskala besar, seperti PT Vale dan perusahaan mitra lainnya, struktur ekonomi mulai mengalami pergeseran. Banyak warga mulai bergantung pada sektor pertambangan, baik sebagai tenaga kerja langsung maupun sebagai penyedia jasa pendukung. Hal ini membawa dampak positif berupa peningkatan pendapatan dan pembangunan infrastruktur dasar.

## **B. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian tentang *Tata Kelola kolaboratif dalam mewujudkan green economy di Kawasan PT.VALE IGP Morowali*. ditujukan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana penerapan *tata kelola kolaboratif* dalam mewujudkan *green economy* di Kawasan PT.VALE IGP Morowali. Penelitian ini menerapkan proses kolaboratif yang mencakup dengan menekankan pada lima aspek yang meliputi, dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman Bersama, hasil antara.

Dalam hal ini, Dialog tatap muka merupakan fondasi utama dari proses kolaboratif. hal ini diwujudkan melalui pertemuan langsung antara pihak perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat lokal. Membangun kepercayaan menjadi persyaratan penting untuk keberhasilan kolaborasi. kepercayaan dibangun secara bertahap melalui keterbukaan informasi oleh masing masing pihak, konsistensi pelaksanaan tujuan yang ingin di capai, serta responsif terhadap kepentingan masyarakat. Komitmen terhadap proses meliputi bagaimana setiap aktor kolaboratif, baik itu dari perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat sipil, perlu menunjukkan komitmenya terhadap proses tata kelola.

Komitmen ini terlihat dari konsistensi keikutsertaan dalam forum-forum kolaboratif, kesediaan berbagi sumber daya dan informasi, serta keinginan untuk mencari solusi bersama atas tantangan yang dihadapi. Pemahaman bersama tercipta ketika seluruh pihak memiliki persepsi yang sama mengenai tujuan, tantangan, dan langkah strategis dalam kolaborasi. pemahaman bersama dibangun melalui proses sosialisasi, edukasi lingkungan, dan penyusunan perencanaan program yang partisipatif. Hasil antara adalah pencapaian sementara yang menjadi indikator keberhasilan awal dari proses kolaborasi.

Data dalam penelitian ini di peroleh melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi, kemudian di analisis berdasarkan lima indicator yang telah di tetapkan. Penyajian data di sertai dengan narasi informan kunci, yang mencakup pihak PT.VALE IGP Morowali, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Masyarakat lokal. Melalui pendekatan tersebut, di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan Gambaran secara menyeluruh mengenai tata Kelola kolaboratif

dalam mewujudkan *green economy* tersebut.

### 1. Dialog tatap muka

Dialog tatap muka merupakan elemen pertama dalam proses tata kelola kolaboratif, karena memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara para pemangku kepentingan untuk membangun saling pengertian, kepercayaan, dan komitmen bersama. Dialog tatap muka menjadi sarana utama dalam menyatukan perspektif berbagai aktor seperti pihak PT VALE, pemerintah kecamatan Bungku Timur, pemerintah desa, masyarakat lokal. Dialog ini menjadi wadah untuk menyatukan pandangan, menyelesaikan persoalan, dan merumuskan langkah-langkah bersama antara perusahaan, pemerintah (baik di tingkat kecamatan maupun desa).



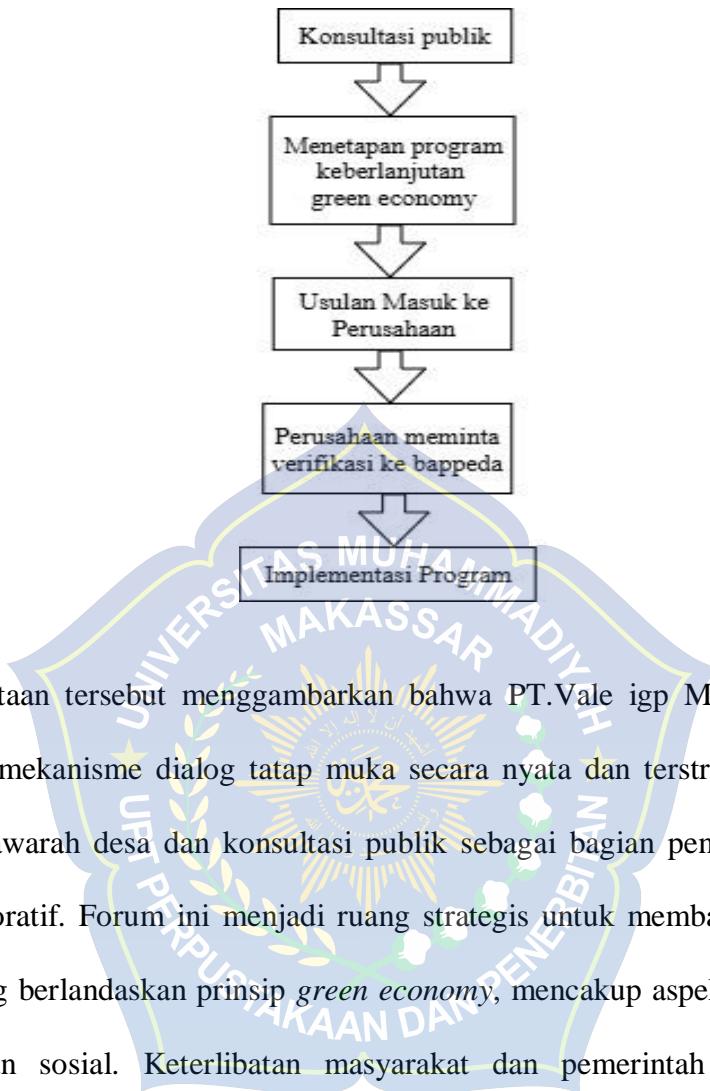
### *Dokumentasi forum konsultasi publik*

Dalam hal ini, berbagai forum terbuka, seperti forum konsultasi publik, musyawarah desa, dan pertemuan koordinasi lintas instansi. Melalui forum ini, PT Vale mengkomunikasikan program keberlanjutan yang akan dilaksanakan, sekaligus menerima masukan dari masyarakat lokal, pemerintah desa, dan kecamatan.

Hal ini ditegaskan oleh External PT.Vale Igp Morowali :

“Bentuk Dialog tatap muka kami itu, yang Dimana iyalah forum konsultasi publik dan musyawara Bersama pemangku kepentingan. Dimana melalui musyawarah dan konsultasi publik tersebut untuk membahas mengenai perencanaan program yang ingin di jalankan. Dalam menentukan program ini juga kami melihat apa yang menjadi RPJMDES (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa), kebutuhan desa, kondisi aktual desa. Program keberlanjutan berlandaskan *green economy* yang dilaksana Bersama pemangku kepentingan yaitu terbagi jadi 3, pertama program lingkungan program TPS3R di desa Bahomotefe. Kedua program ekonomi seperti program pengembangan petani padi sri organik di 4 desa yang Dimana tahap awal kami implementasikan di ibu kota kecamatan bungku timur, program pengembangan umkm nata de coco dengan obat herbal di 1 kecamatan. Ketiga program sosial seperti pelatihan tenaga kerja lokal, program infrastruktur jalan tani, pengembangan vasilitas puskesmas bungku timur. yang Dimana beberapa program tersebut kami tawarkan ke beberapa desa sesuai kondisi aktual desa dan juga di usulkan langsung Masyarakat dan pemerintah desa, kemudian usulan program tersebut di berikan kepada kami PT Vale. Dengan adanya usulan tersebut kami akan meminta verifikasi kepada pihak Bapeda karna untuk mengetahui apakah program tersebut ini sudah akan dijalankan oleh pemerintah. Nah jika sudah ingin dijalankan oleh pemerintah, kami akan lakukan kolaborasi dengan pemerintah. Jadi sebelum di lakukan penetapan program ini ada tata kelolanya dari PT Vale seperti prosedur nya yang dalam bentuk fisik seperti foto di lapangannya yang akan dibuatkan program, proposal penggunaan dananya, dan adanya PKS (perjanjian kerja sama). Dan kalaupun sudah ada pengesahan program tersebut dari PSDN kami akan kembali kedesa lagi untuk memberi tahu program yang ingin kita laksanakan.”

### *Siklus implementasi program*



Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa PT.Vale igp Morowali telah menerapkan mekanisme dialog tatap muka secara nyata dan terstruktur melalui forum musyawarah desa dan konsultasi publik sebagai bagian penting dari tata kelola kolaboratif. Forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas berbagai program yang berlandaskan prinsip *green economy*, mencakup aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa dalam menyampaikan usulan program menunjukkan adanya pendekatan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi turut menjadi aktor utama dalam merumuskan kebutuhan dan potensi lokal. Hal ini menjadi indikasi bahwa proses kolaborasi telah mendorong terjadinya transfer aspirasi dari bawah (*bottom-up*) dan bukan sekadar pendekatan dari atas (*top-down*).

Tindakan PT.Vale yang menindaklanjuti usulan masyarakat dengan melakukan verifikasi ke Bappeda menunjukkan adanya upaya sinkronisasi antara

program perusahaan dan agenda pembangunan pemerintah daerah. Ini mencerminkan bahwa perusahaan tidak berjalan sendiri, melainkan mencoba membangun kolaborasi lintas sektor secara harmonis. Prosedur yang diterapkan mulai dari dokumentasi lapangan, penyusunan proposal dana, hingga penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) menandakan bahwa setiap program yang dijalankan telah melalui tahapan yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, adanya pengesahan dari PSDN sebagai bagian dari struktur internal perusahaan memperkuat aspek tata kelola yang sistematis dan akuntabel.

Langkah PT.Vale untuk kembali menyampaikan hasil penetapan program kepada desa juga menunjukkan bentuk tanggung jawab informasi dan akuntabilitas publik. Hal ini penting dalam membangun kepercayaan dan menjaga komunikasi yang terbuka antara perusahaan dan masyarakat. Praktik ini secara keseluruhan memperlihatkan bahwa PT.Vale tidak hanya fokus pada pelaksanaan program berkelanjutan, tetapi juga berkomitmen menjalankan prinsip tata kelola kolaboratif yang inklusif, transparan, dan berbasis kebutuhan lokal. Dengan pendekatan seperti ini, kolaborasi yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada keberhasilan proyek semata, tetapi juga pada pembentukan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat.

Hal tersebut juga di tegaskan oleh pihak Pemerintah Kecamatan Bungku Timur :

“Selama PT. Vale berada di wilaya kecamatan bungku timur, PT Vale selalu terbuka kepada kami terhadap program-program kerjasamnya. Melalui musyawarah dan konsultasi publik ini di turut di ikuti dari berbagai pihak seperti pemerintah kecamatan,pemerintah desa,pihak PT.vale dan masyarakat lokal. Jadi Dalam musyawarah dan konsultasi publik ini dari berbagai pihak saling koordinasi mengenai potensi desa yang ingin

dilaksanakan kolaborasi program, nah dari informasi yang diberikan oleh pihak desa dan kecamatan, PT Vale yang akan melakukan penetapan perencanaan programnya, PT Vale juga yang mempersiapkan segala bentuk persiapan mengenai program yang akan dilaksanakan seperti persiapan dana atau rancana anggaran biaya (RAB), dan perizinan pelaksanaan program. Jadi Ketika PT Vale selesai mengenai perizinan dan penganggaran, mereka akan konfirmasikan kepada kecamatan dan desa untuk penetapan program yang dilaksanakan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa musyawarah desa sebagai forum dialog tatap muka memainkan peran penting dalam proses tata kelola kolaboratif antara PT.Vale, pemerintah kecamatan, pemerintah desa. Dalam forum ini, terjadi pertukaran informasi dan koordinasi yang menjadi dasar penyusunan program kolaboratif. Keikutsertaan berbagai pihak menandakan adanya keterbukaan dan ruang partisipasi, namun dalam praktiknya terlihat bahwa pengambilan keputusan akhir serta pengelolaan teknis dan administratif program tetap didominasi oleh pihak PT.Vale.

Adanya konfirmasi ulang dari PT.Vale kepada pemerintah desa dan kecamatan sebelum pelaksanaan menunjukkan adanya upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan. Artinya, meskipun peran koordinatif masih dominan di tangan perusahaan, perusahaan tetap berupaya membangun komunikasi terbuka dan merangkul partisipasi pihak lokal sebagai bagian dari legitimasi program.

Pihak Pemerintah Desa Geresa sekaligus ketua APDESI DPC Morowali juga menyampaikan :

“Bicara mengenai program keberlanjutan PT.Vale dalam mendukung *green economy* saya sebagai pemerintah desa Geresa sekaligus ketua APDESI DPC Kabupaten Morowali dari pemerintah desa, mengenai dialog keterbukaan PT.Vale kami seluruh pemerintah desa dan pemerintah desa lainnya yang ada di kecamatan Bungku Timur selalu dilibatkan dalam

musyawarah-musyawarah yang diadakan bersama PT Vale dan pemerintah kecamatan pun ikut hadir. Selain dalam musyawarah, bentuk komunikasi atau wadah dialog kami itu iyalah konsultasi publik Dimana konsultasi ini untuk membahas kesepakatan terkait suatu kebijakan serta perencanaan mengenai program yang ingin dijalankan. Dan dalam musyawarah desa, kami sampaikan usulan program yang berasal dari masyarakat, seperti infrastruktur jalan tani. Setelah itu, pihak PT. Vale akan menindaklanjuti dengan survei lapangan atau kondisi Lokasi implementasi program, lalu menyusun perencanaan dan anggaran programnya. Kalau semuanya sudah lengkap, mereka datang kembali ke desa untuk menjelaskan kapan programnya mulai dijalankan dan bagaimana teknis pelaksanaannya.”

Pernyataan dari pihak pemerintah desa Geresa sekaligus Ketua APDESI DPC Morowali menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi dan koordinasi antara PT Vale, pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan telah berjalan secara aktif dan partisipatif. Keterlibatan pemerintah desa dalam musyawarah desa dan konsultasi publik menjadi bukti bahwa perusahaan tidak bekerja secara sepahak, melainkan membuka ruang dialog terbuka yang memungkinkan terjadinya penyampaian aspirasi langsung dari masyarakat. Dalam forum tersebut, pemerintah desa berperan sebagai penghubung antara warga dan perusahaan, menyampaikan kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan tani, yang kemudian ditindaklanjuti oleh PT.Vale melalui langkah-langkah teknis yang sistematis.

Tindakan PT.Vale yang merespons usulan dengan melakukan survei lapangan serta menyusun rencana anggaran program menunjukkan komitmen mereka terhadap proses kolaboratif yang transparan dan terukur. Proses ini mencerminkan bahwa perusahaan tidak langsung mengambil keputusan tanpa pertimbangan lapangan, melainkan menjalankan tahapan verifikasi dan perencanaan yang melibatkan data faktual serta pertimbangan dari pemangku kepentingan lokal. Hal

ini memperlihatkan adanya struktur tata kelola yang menjunjung nilai kehati-hatian, akuntabilitas, dan kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan implementasi program.

Siklus komunikasi dua arah ini menunjukkan adanya niat baik untuk menjaga kepercayaan dan menjalin kolaborasi yang saling menguntungkan. Dengan demikian, pernyataan ini menguatkan bahwa bentuk dialog yang dilakukan PT.Vale tidak hanya menjadi formalitas, tetapi telah berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membangun partisipasi, kepercayaan, dan kesepahaman bersama antara perusahaan dan masyarakat desa.

Masyarakat Desa Geresa menyampaikan:

“Saya sebagai masyarakat lokal yang pernah hadir di forum konsultasi publik merasakan bahwa semua masukan atau usulan masyarakat benar-benar didengar dan dipertimbangkan. Pihak perusahaan bersama pemerintah daerah memberikan ruang dialog yang terbuka, sehingga kami sebagai Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan dan kekhawatiran kami, terutama yang berkaitan dengan dampak kegiatan pertambangan dan program pemberdayaan. Beberapa usulan yang kami sampaikan, seperti perbaikan infrastruktur desa, dukungan untuk petani, dan pelatihan keterampilan tenaga kerja lokal, mulai terlihat tindak lanjutnya di lapangan. Hal ini membuat saya merasa bahwa forum konsultasi publik bukan hanya formalitas, tetapi menjadi wadah nyata untuk mempertemukan kepentingan masyarakat, pemerintah, dan Perusahaan dalam satu misi yang sama yaitu membangun daerah khususnya di kecamatan bungku timur”

Pernyataan dari masyarakat lokal tersebut mencerminkan adanya pengakuan positif, Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa forum konsultasi publik di wilayah PT.Vale IGP Morowali berjalan dengan prinsip partisipasi yang baik. Masyarakat merasakan bahwa suara mereka tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti, yang menandakan adanya *good will* dari pihak perusahaan dan pemerintah daerah untuk membangun komunikasi dua arah.

Tindak lanjut terhadap usulan Masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur desa, dukungan sektor pertanian, dan pelatihan keterampilan menunjukkan bahwa forum ini berfungsi bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan kolaborasi. Hal ini selaras dengan prinsip tata kelola kolaboratif, di mana setiap pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program.

Keberhasilan PT Vale dalam menciptakan ruang dialog tatap muka menjadi salah satu fondasi penting dalam implementasi tata kelola kolaboratif dalam mewujudkan green economy. Melalui forum-forum seperti konsultasi publik, PT Vale mampu membangun saluran komunikasi yang terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat serta pemerintah lokal. Forum ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar dijadikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan, mendiskusikan potensi desa, serta menyusun program-program yang relevan dan berbasis konteks lokal.

Keberhasilan PT. Vale dalam menciptakan ruang dialog tatap muka menjadi salah satu fondasi penting dalam implementasi tata kelola kolaboratif. Melalui forum-forum seperti musyawarah desa dan konsultasi publik, PT. Vale mampu membangun saluran komunikasi yang terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat serta pemerintah lokal. Forum ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar dijadikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan, mendiskusikan potensi desa, serta menyusun program-program yang relevan dan berbasis konteks lokal.

## 2. Membangun kepercayaan

Membangun kepercayaan merupakan elemen penting yang menentukan keberlangsungan dan keberhasilan kerja sama antara para pemangku kepentingan. Kepercayaan tidak hadir secara instan, melainkan dibentuk melalui proses yang bertahap dan konsisten. Kolaborasi antara perusahaan seperti PT. Vale, pemerintah, Masyarakat. kepercayaan menjadi pondasi yang memungkinkan semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan bersama. Ketika kepercayaan terbangun, maka koordinasi akan lebih efektif, partisipasi meningkat, dan konflik dapat diminimalisir.

Proses membangun kepercayaan tercermin dari keterbukaan informasi, kesediaan berbagi tanggung jawab, serta komitmen terhadap hasil bersama. perusahaan secara transparan dalam pelaksanaan program, menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan, dan akuntabel terhadap dampak yang ditimbulkan, masyarakat dan pemerintah lokal akan lebih percaya dan siap untuk terlibat aktif. Begitu pula sebaliknya, Jika masyarakat dan pemerintah menunjukkan komitmen untuk terlibat secara konstruktif, maka perusahaan akan semakin terbuka untuk menjalin kolaborasi lebih dalam.

Keterlibatan aktif dari semua pihak dan transparansi dalam penggunaan dana merupakan dua unsur penting yang saling berkaitan dalam proses membangun kepercayaan dalam tata kelola kolaboratif. Ketika semua pemangku kepentingan baik perusahaan, pemerintah, masyarakat lokal. Terlibat secara aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program, hal tersebut menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap hasil yang ingin dicapai.

Pihak PT.Vale igp Morowali Menegaskan :

“Dalam membangun kepercayaan kepada semua pihak baik Kecamatan, desa, maupun Masyarakat. kami selalu memastikan bahwa setiap tindakan dan program yang kami laksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami juga memastikan bahwa PT.Vale selalu memberikan respon cepat terhadap usulan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Pemerintah Desa.”

Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen nyata PT.Vale dalam membangun dan menjaga kepercayaan dengan seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan yang sistematis, transparan, dan responsif. Kepercayaan bukan dibangun lewat retorika semata, melainkan melalui tindakan konkret yang menunjukkan konsistensi antara perencanaan dan implementasi. Dengan memastikan setiap program dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, PT.Vale memperlihatkan bentuk tanggung jawab institusional dalam menjalankan tata kelola kolaboratif yang kredibel. PT.Vale memiliki responsivitas yang tinggi dalam menjalin komunikasi dan kerja sama dengan masyarakat melalui pemerintah desa. Kemampuan perusahaan untuk memberikan respon cepat terhadap usulan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dari tata kelola kolaboratif yang efektif. Tindakan ini mencerminkan bahwa PT.Vale tidak hanya mendengar, tetapi juga menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara konkret, sehingga memperkuat rasa dihargai dan dipercaya di kalangan warga.

Pemerintah Kecamatan Bungku Timur juga mengatakan :

“Kami dari pihak kecamatan melihat bahwa kepercayaan antara kami, desa, dan PT.Vale dibangun melalui komunikasi yang terbuka. Dalam forum musyawarah itu, semua pihak bisa menyampaikan pandangan, termasuk kami di kecamatan terhadap potensi-potensi desa yang bisa dikembangkan melalui program, sehingga tidak ada kesan bahwa keputusan hanya datang dari satu pihak saja. Kami juga aktif memastikan bahwa setiap usulan dari desa dan masyarakat benar-benar disampaikan dan ditindak lanjuti. Dari situ

kepercayaan mulai tumbuh, karena masyarakat merasa suaranya dihargai, dan kami dari kecamatan juga merasa dilibatkan secara penuh. Ini yang membuat kepercayaan antar pihak terus terjaga.”

Pernyataan dari pihak Kecamatan tersebut menunjukkan bahwa proses membangun kepercayaan dalam tata kelola kolaboratif antara Pemerintah Daerah, desa, dan PT.Vale telah berjalan secara aktif dan berkesinambungan. Komunikasi yang terbuka dan konsisten menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan antarpihak, serta membentuk fondasi yang kuat bagi kerja sama jangka panjang. Pelibatan pemerintah kecamatan sejak awal dalam forum musyawarah maupun proses verifikasi program menunjukkan bahwa PT.Vale tidak bekerja secara sepihak, melainkan membuka ruang dialog yang inklusif dan partisipatif.

Peran aktif pihak Kecamatan dalam menyampaikan dan mengawal usulan dari masyarakat menunjukkan adanya komitmen institusional untuk menjembatani kepentingan warga dengan pihak perusahaan. Ketika masyarakat merasa aspirasinya ditindaklanjuti dan pihak kecamatan merasa dilibatkan secara penuh, maka relasi antar aktor menjadi lebih setara dan harmonis. Proses inilah yang memperkuat rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang terlibat, karena hubungan tidak hanya dibangun secara formal, tetapi juga secara emosional dan fungsional berdasarkan peran yang dijalankan. Peran ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena mereka melihat bahwa suara dan kebutuhan mereka benar-benar diperjuangkan.

Pemerintah Desa Bahomotefe juga menegaskan :

“Bagi kami, kunci dari kepercayaan itu adalah transparansi dan komunikasi yang rutin dan itu sudah di tunjukan oleh PT. Vale sejak awal, Setiap program yang dijalankan, dari perencanaan sampai pelaksanaan program, selalu kami kawal dan koordinasikan dengan pihak kecamatan dan PT.Vale.

Dan setiap informasi yang diterima dari Perusahaan, baik terkait rencana program, proses verifikasi, hingga anggaran selalu kami sampaikan secara terbuka kepada Masyarakat dan PT.Vale.”

Pemahaman mendalam dari pihak pemerintah desa mengenai pentingnya transparansi dan komunikasi sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan dalam tata kelola kolaboratif. Dengan mengawal setiap tahapan program. mulai dari perencanaan, verifikasi, hingga pelaksanaan. pemerintah desa menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Tidak hanya sebagai perantara, pemerintah desa berperan aktif sebagai pengawal proses dan penghubung informasi yang dapat dipercaya oleh warga.

Keterbukaan dalam menyampaikan informasi dari perusahaan kepada masyarakat juga menjadi bukti bahwa pemerintah desa tidak ingin menciptakan jarak atau ketimpangan informasi. Transparansi seperti ini sangat penting untuk mencegah munculnya prasangka negatif, spekulasi, atau ketidakpercayaan terhadap program-program yang dijalankan oleh perusahaan. Ketika masyarakat merasa mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap, mereka akan lebih terbuka untuk terlibat dan mendukung program tersebut.

Tanggapan Masyarakat desa Bahomotefe Mengenai hal tersebut :

“Saya sebagai masyarakat lokal melihat bahwa pemerintah desa selalu terbuka soal penggunaan anggaran. Informasi penggunaan dana anggaran di sampaikan dalam ruang musyawarah desa, seperti dalam program Pembangunan pukesmas di bahomotefe ini, sehingga kami mengetahui kemana dana tersebut di alokasikan. Sedangkan PT.Vale selalu konsisten dalam menjalankan program yang sudah disepakati. Dengan begitu kami percaya bahwa setiap program program yang dijalankan oleh PT.VALE akan konsisten dan berjalan dengan baik.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah desa,

PT.Vale, dan masyarakat lokal telah terbangun dengan cukup baik melalui praktik keterbukaan dan konsistensi tindakan. Keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi penggunaan anggaran melalui forum musyawarah desa memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami alur penggunaan dana dan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal ini bukan hanya membangun transparansi, tetapi juga memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap program pembangunan desa seperti Pembangunan pukesmas. Di sisi lain, konsistensi PT.Vale dalam melaksanakan program yang telah disepakati memberikan sinyal positif bahwa perusahaan memiliki komitmen jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Pelaksanaan program secara berkesinambungan menumbuhkan rasa percaya dan menciptakan persepsi bahwa PT.Vale adalah mitra yang dapat diandalkan dalam pembangunan sosial dan ekonomi desa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sinergi antara transparansi pemerintah desa dan konsistensi perusahaan dapat menjadi modal sosial penting untuk membangun hubungan kolaboratif yang saling menguntungkan, di mana setiap pihak memiliki peran aktif dan saling mendukung demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Keberhasilan semua pihak dalam membangun kepercayaan dalam tata kelola kolaboratif tercermin dari terjalinnya komunikasi yang terbuka, pelibatan aktif dalam setiap proses. PT.Vale, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat lokal menunjukkan sinergi yang kuat dalam menjalankan peran masing-masing, di mana setiap keputusan diambil secara partisipatif dan berdasarkan kesepahaman bersama. Transparansi dalam perencanaan, serta keterbukaan

informasi memperkuat rasa saling percaya. Kepercayaan ini menjadi fondasi penting yang memungkinkan kolaborasi berjalan berkelanjutan dan program-program yang dilaksanakan memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Komitmen terhadap proses

Komitmen terhadap proses adalah wujud keseriusan dan kesediaan semua pihak yang terlibat baik perusahaan, pemerintah, Masyarakat. untuk terus terlibat secara aktif, konsisten, dan bertanggung jawab sepanjang jalannya kolaborasi. Komitmen ini tidak berhenti pada kehadiran dalam forum atau penandatanganan kerja sama semata, tetapi tercermin dalam partisipasi nyata dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program. Dalam konteks PT.Vale IGP Morowali, komitmen ini terlihat dari kesediaan perusahaan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, menyesuaikan program berdasarkan kebutuhan lokal, serta memastikan keberlanjutan program melalui dukungan anggaran, pendampingan teknis, dan pelaporan berkala.

Dalam hal ini, PT.Vale terus melibatkan masyarakat dan pemerintah lokal sejak tahap awal perencanaan program, menyediakan informasi secara terbuka, serta menindak lanjuti hasil dialog dalam bentuk aksi nyata. Perusahaan juga menyediakan alokasi anggaran yang memadai, menjaga keberlangsungan program jangka panjang, dan menjalankan evaluasi rutin bersama para pemangku kepentingan. pemerintah kecamatan dan desa perlu menunjukkan komitmen mereka dengan menjadi jembatan yang aktif antara masyarakat dan perusahaan. Ini mencakup peran mereka dalam mengoordinasikan aspirasi warga, ikut menyusun

usulan program secara partisipatif, serta ikut mengawasi implementasi dan dampaknya.

Pemerintah harus menjaga netralitas dan memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan bukan hanya kepentingan perusahaan. Sedangkan Masyarakat, komitmennya dapat ditunjukkan dengan terus aktif terlibat dalam forum-forum dialog, memberikan masukan dan kritik konstruktif, serta berperan dalam memantau pelaksanaan program di lapangan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra dalam memastikan bahwa tujuan program seperti kesejahteraan, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan betul-betul tercapai.

Hasil wawancara dengan pihak PT.VALE menyampaikan :

“Dalam pelaksanaan program, kami melakukan pengawasan dan pendampingan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga program berjalan dan menghasilkan barang maupun jasa. Contoh hasil dari program tersebut di antaranya yaitu produk-produk dari UMKM lokal dan hasil pertanian berupa padi organik, serta pelatihan tenaga kerja lokal yang saat ini telah berjalan dengan baik. Nah ini bentuk komitmen kami terhadap proses pelaksanaan program.”

Bentuk nyata dari komitmen terhadap proses yang ditunjukkan oleh pihak pelaksana program, dalam hal ini PT.Vale. Komitmen tersebut tidak hanya ditunjukkan dalam bentuk kehadiran simbolik atau administratif, tetapi benar-benar diwujudkan melalui pendampingan aktif dan pengawasan menyeluruh sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan mengawal setiap proses program, pihak perusahaan menunjukkan keseriusannya dalam memastikan bahwa program tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan hasil konkret dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti berkembangnya UMKM lokal dan keberhasilan panen padi

organik. Serta pelatihan tenaga kerja lokal yang memberikan keterampilan dalam dunia kerja pertambangan.

Tindakan tersebut menunjukkan bahwa PT.Vale tidak sekadar menjalankan program sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan yang konsisten dalam menjamin keberlanjutan program. Komitmen terhadap proses ini menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan dan legitimasi sosial dari masyarakat serta memperkuat kolaborasi lintas sektor yang efektif. Dengan demikian, komitmen seperti ini tidak hanya memperlancar pelaksanaan program, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan di wilayah operasional perusahaan.

Pemerintah Kecamatan Bungku Timur juga mengatakan :

“Setiap kali ada rencana program, kami selalu dilibatkan sejak awal dalam musyawarah dan proses verifikasi hingga berjalannya suatu program. Komitmen kami dalam keterlibatan juga kuat, karena kami tahu bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pihak perusahaan, tapi juga pada dukungan dari pemerintah kecamatan. Oleh karena itu, kami aktif mengawal jalannya program, ikut hadir saat survei lapangan, dan memastikan bahwa usulan dari masyarakat ditindaklanjuti. Kami juga memantau pelaksanaannya agar berjalan sesuai rencana, sehingga masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaatnya.”

Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen yang kuat dari pihak pemerintah kecamatan dalam mendukung keberhasilan tata kelola kolaboratif, khususnya dalam program-program yang dijalankan bersama PT Vale. Keterlibatan sejak awal dalam proses musyawarah dan verifikasi menunjukkan bahwa kecamatan tidak hanya menjalankan peran administratif, tetapi juga berfungsi sebagai pengawal jalannya proses kolaborasi secara aktif dan bertanggung jawab.

Hal ini memperlihatkan adanya kesadaran bahwa keberhasilan program tidak dapat dicapai secara sepihak, melainkan memerlukan dukungan dan sinergi dari semua pemangku kepentingan, termasuk peran strategis pemerintah lokal.

Partisipasi pemerintah kecamatan dalam survei lapangan dan pengawasan pelaksanaan program menunjukkan bahwa mereka tidak bersikap pasif. Sebaliknya, mereka menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus sebagai penghubung antara masyarakat dan perusahaan, memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan dan kegiatan nyata. Dengan memantau jalannya program dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana, pihak kecamatan memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan antar pihak yang terlibat.

Pihak Pemerintah Desa Kolono juga menegaskan :

“Sebagai pemerintah desa, kami tidak hanya berhenti di tahap perencanaan program. Kami ikut mengawal dari awal sampai selesai, mendampingi di lapangan, dan memastikan aparat desa terlibat langsung. Kami rutin berkoordinasi dengan PT.Vale dan pemerintah kecamatan supaya semua berjalan sesuai rencana. Bagi kami, keberhasilan program itu tergantung seberapa aktif juga desa terlibat, bukan hanya memfasilitasi, tapi juga mengawasi dan mendukung masyarakat. Kami juga selalu mendorong masyarakat untuk aktif dan siap menjadi penghubung antara masyarakat dan perusahaan kapan pun dibutuhkan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah desa dalam memastikan keberhasilan program yang dijalankan bersama PT Vale dan pemerintah kecamatan. Pendekatan yang tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi juga mencakup pendampingan langsung di lapangan, menggambarkan keseriusan desa dalam menjaga kualitas pelaksanaan. Koordinasi yang rutin dilakukan menandakan adanya komunikasi yang baik antar-pihak, sehingga potensi hambatan dapat diatasi lebih cepat. Penekanan bahwa desa

berperan bukan hanya sebagai fasilitator, tetapi juga pengawas dan pendukung masyarakat, memperlihatkan kesadaran akan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam mengawal kepentingan warganya.

Pernyataan dari pihak pemerintah desa tersebut menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program kolaboratif yang dijalankan bersama PT.Vale dan pemerintah kecamatan. Komitmen ini tercermin tidak hanya dalam kehadiran formal saat perencanaan atau musyawarah awal, tetapi juga melalui keterlibatan langsung dalam seluruh tahapan pelaksanaan. Ini menandakan bahwa pemerintah desa memposisikan diri sebagai aktor sentral yang aktif dan bertanggung jawab, bukan hanya sebagai pelengkap administratif.

Peran desa sebagai pengawas sekaligus pendukung di tengah masyarakat memperkuat fungsi strategisnya dalam menjembatani kebutuhan warga dengan kebijakan program. Dorongan pemerintah desa agar masyarakat ikut aktif juga menjadi bagian penting dari strategi membangun kebersamaan dan rasa memiliki, sehingga program tidak hanya menjadi milik perusahaan atau pemerintah, tetapi menjadi bagian dari kepedulian bersama.

Masyarakat Desa Kolono mengatakan :

“Sebagai masyarakat, kami juga berusaha terlibat aktif dalam program yang melibatkan kami. Seperti, waktu ada pelatihan pertanian padi organik, kami ikut hadir, belajar, dan praktik langsung. Bagi kami, dengan ikut terlibat begitu, artinya kami menunjukkan komitmen kami terhadap pelaksanaan program. Dari adanya program padi sri organik ini sangat memberikan dampak positif terhadap pengeluaran biaya pupuk yang awalnya kami membeli pupuk untuk padi, sekarang kami sudah mengelola pupuk sendiri, sehingga mengurangi pembiayaan pupuk.”

Masyarakat lokal tidak memposisikan diri semata sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam pelaksanaan program kolaboratif. Partisipasi

mereka dalam pelatihan pertanian organik menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk ikut mendukung keberhasilan program melalui keterlibatan langsung, baik dalam proses belajar maupun praktik di lapangan. Sikap ini merupakan wujud konkret dari komitmen masyarakat terhadap keberhasilan program, yang ditunjukkan bukan hanya dengan kehadiran simbolik, tetapi dengan kesungguhan mengikuti seluruh tahapan kegiatan.

Keterlibatan aktif masyarakat seperti ini juga menciptakan hubungan yang lebih setara dan saling berkomitmen antara perusahaan, pemerintah, dan warga. Ketika masyarakat merasa diberi ruang dan peran nyata, mereka cenderung menunjukkan rasa memiliki terhadap program, serta menjaga agar pelaksanaannya sesuai tujuan. Hal ini memperkuat fondasi tata kelola kolaboratif, karena keberlanjutan program tidak lagi bergantung sepenuhnya pada perusahaan atau pemerintah, melainkan juga pada dukungan dari warga itu sendiri.

Partisipasi aktif masyarakat bukan hanya memperkuat kualitas implementasi program, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pendekatan partisipatif yang berbasis kebutuhan lokal. Ini sekaligus menjadi bentuk kontribusi moral dan sosial masyarakat dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

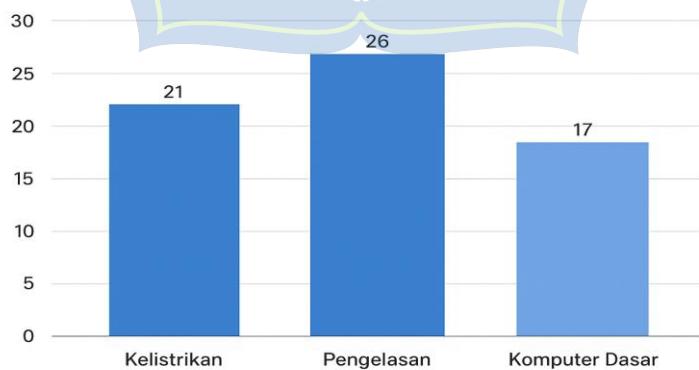
Program-program kolaboratif yang dijalankan mulai menunjukkan hasil nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Keberhasilan ini tidak lepas dari pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan masyarakat, sehingga setiap program berjalan sesuai kebutuhan lokal dan mendapat dukungan penuh dari semua pihak. Berikut Bentuk nyata keberhasilan program yang telah dijalankan:

### **1. Program Pelatihan tenaga kerja lokal**

PT Vale Indonesia Tbk memiliki program tenaga kerja lokal yang dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang. Dengan cara ini, masyarakat setempat mendapatkan peluang yang lebih besar untuk terlibat langsung dalam industri pertambangan. Selain memberikan kesempatan kerja, PT Vale juga menaruh perhatian besar pada pengembangan kompetensi tenaga kerja. Melalui strategi ini, PT Vale tidak hanya menempatkan tenaga kerja sebagai pelengkap operasi tambang, melainkan juga sebagai mitra pembangunan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Berikut jumlah peserta pelatihan tenaga kerja lokal dari PT VALE IGP MOROWALI dengan masing masing bidangnya:

**Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Kerja  
PT Vale IGP Morowali**





*Dokumentasi pelatihan tenaga kerja lokal PT VALE IGP MOROWALI*

Berdasarkan diagram yang ditampilkan, terlihat bahwa program pelatihan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh PT Vale IGP Morowali berhasil menjangkau berbagai bidang keterampilan. Bidang pengelasan menjadi program dengan jumlah peserta terbanyak, yaitu 26 orang, diikuti oleh bidang kelistrikan dengan 21 peserta, dan komputer dasar dengan 17 peserta. Data ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tujuan yang tidak hanya fokus pada satu bidang, tetapi berupaya membekali masyarakat lokal dengan beragam keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja.

Dengan adanya program tenaga kerja local ini memberikan manfaat yaitu, Peningkatan keterampilan, yang menjadi salah satu hasil nyata dari program pemberdayaan PT Vale yang dirancang untuk meningkatkan daya saing tenaga

kerja lokal. Dengan pelatihan yang terarah dan sesuai kebutuhan industri, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau bahkan mengembangkan usaha mandiri. Hasil ini sekaligus mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan di wilayah Morowali.

## **2. Program Restorasi Wilayah Pesisir TPS 3R**

Program Restorasi Wilayah Pesisir melalui TPS 3R merupakan salah satu upaya pengelolaan lingkungan yang berfokus pada penanganan sampah di kawasan pesisir. TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) dibangun di dekat kawasan pemukiman dan pesisir untuk memudahkan proses pengumpulan serta pemilahan sampah. Latar belakang program ini adalah tingginya permasalahan sampah, khususnya sampah plastik dan limbah rumah tangga, yang mencemari laut dan ekosistem pesisir. Dengan pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), program ini berusaha mengurangi jumlah sampah sejak dari sumbernya, memanfaatkan kembali barang yang masih layak pakai, serta mendaur ulang material yang memiliki nilai guna baru.

Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat pesisir sebagai aktor utama. Di sini, sampah organik diolah menjadi kompos yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, sementara sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam dipilah untuk didaur ulang atau dijual kembali ke industri pengolahan. Dengan cara ini, volume sampah yang berakhir di laut dapat ditekan secara signifikan. Lebih dari sekadar pengelolaan sampah, program ini juga memiliki dimensi pemberdayaan masyarakat. Masyarakat pesisir

diberikan pelatihan mengenai teknik pemilahan sampah, pengolahan kompos, hingga kewirausahaan berbasis daur ulang. Hasil dari pengolahan sampah, baik berupa kompos maupun produk kerajinan daur ulang, dapat memberikan nilai ekonomi tambahan. Dengan demikian, program ini tidak hanya menyehatkan lingkungan pesisir, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga melalui peluang usaha baru.

Secara keseluruhan, Program Restorasi Wilayah Pesisir melalui TPS 3R dapat dipahami sebagai strategi kolaboratif yang tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga membangun kesadaran lingkungan, memperkuat ekonomi masyarakat, dan menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Melalui sinergi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, program ini menjadi contoh nyata bagaimana pengelolaan sampah dapat diintegrasikan dengan tujuan restorasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan sirkulasi 12 hari penggerjaan di Lokasi yang bermukiman 620 kepala keluarga menghasilkan pengumpulan sampah yang didapatkan. Berikut tabel hasilnya:

No	Jenis sampah	Jumlah perkilo	Jumlah per ton
1.	Sampah Organik	3.300	3,30
2.	Sampah Anorganik	792	0,79
3.	Sampah Residu	1.100	1,10
	<b>Total</b>	<b>5.192</b>	<b>5,19 ton</b>

*Data Program TPS 3R PT VALE IGP MOROWALI*



*Dokumentasi program TPS 3R*

Berdasarkan hasil tabel pengelolaan sampah, terlihat bahwa program pemilahan yang dijalankan telah membawa hasil yang positif. Dari total sampah yang terkumpul, berhasil dipilah 3,3 ton sampah organik, 792 kilogram sampah anorganik, dan 1,1 ton sampah residu. Sampah organik yang didapatkan akan dikelola menjadi pupuk kompos. Dengan mengolah setengah dari 3,3 ton sampah organik menjadi pupuk kompos, program ini mampu memanfaatkan kembali sumber daya yang sebelumnya terbuang, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.

Keberhasilan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan melalui pengurangan pencemaran, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

### **3. Program Padi Organik**

Metode SRI Organik ini memiliki keunggulan dalam meningkatkan hasil panen sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia sintetis. Program padi SRI (System of Rice Intensification) organik

adalah sebuah metode budidaya padi yang bertujuan meningkatkan hasil panen dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. SRI diperkenalkan sebagai alternatif dari sistem pertanian konvensional yang cenderung bergantung pada pupuk kimia dan pestisida sintetis. Dalam program ini, petani diarahkan untuk mengoptimalkan pertumbuhan padi melalui teknik penanaman, pengairan, dan pemupukan yang lebih ramah lingkungan serta berkelanjutan.

Salah satu prinsip utama dalam SRI adalah menanam bibit padi yang masih muda, biasanya berusia kurang dari dua minggu, dengan jarak tanam yang lebih lebar. Hal ini memungkinkan akar padi berkembang lebih optimal dan tanaman tumbuh lebih sehat. Selain itu, penggunaan air dilakukan dengan sistem pengairan berselang, bukan tergenang terus-menerus, sehingga tanah tetap gembur dan oksigen dapat masuk. Metode ini terbukti mampu mengurangi penggunaan air sekaligus meningkatkan produktivitas lahan.

Program padi SRI organik juga menekankan penggunaan pupuk alami seperti kompos, pupuk kandang, atau pupuk hijau, menggantikan pupuk kimia yang berisiko merusak kesuburan tanah dalam jangka panjang. Pengendalian hama pun dilakukan secara biologis, misalnya dengan memanfaatkan tanaman pengusir hama atau predator alami. Dengan cara ini, kualitas padi yang dihasilkan lebih sehat, bebas residu kimia, dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibanding padi konvensional. Secara keseluruhan, program padi SRI organik memberikan manfaat ganda. Dari sisi lingkungan, metode ini mampu menjaga kesuburan tanah, menghemat air, serta menekan pencemaran akibat bahan kimia pertanian. Dari sisi ekonomi, hasil panen yang lebih melimpah dan berkualitas tinggi membuka

peluang pasar yang lebih luas, bahkan hingga pasar beras organik premium. Sementara dari sisi sosial, program ini memperkuat kapasitas petani lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Untuk melihat distribusi lahan dan hasil panen di masing-masing desa binaan, berikut disajikan tabel estimasi produksi hasil panen.

No	Desa Binaan	Jumlah Petani	Luas Lahan	Jumlah Produksi
1.	Bahomotefe	5	1,4 ha	4,000 kg
2.	Ululere	6	1,6 ha	4.200 kg
3.	Bahomoahi	7	1,8 ha	4.500 kg
4.	Kolono	7	2,0 ha	4.900 kg
	Total	25	6,8 Hektar	17,6000 Kg

*Tabel Jumlah Produksi Padi Organik*



#### *Dokumentasi Program Padi Organik*

Hasil tabel menunjukkan Produksi total 17.600 kg dari 6,8 hektar lahan memberikan pasokan hasil pertanian yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sekaligus dipasarkan, sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi bagi petani. Selain itu, keberlanjutan program ini membantu masyarakat mengurangi ketergantungan pada sektor

tambang semata, menciptakan diversifikasi mata pencaharian, dan menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dengan adanya pendampingan dan fasilitas dari PT Vale, petani tidak hanya memperoleh hasil panen yang stabil, tetapi juga mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan lahan berkelanjutan, yang pada akhirnya memperkuat fondasi ekonomi desa untuk jangka panjang.

#### **4. Program Pengembangan UMKM**

Program Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan salah satu strategi yang banyak dijalankan oleh pemerintah, perusahaan, maupun lembaga swasta untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat bawah. Pengembangan UMKM yang dilakukan PT Vale menjadi salah satu wujud nyata komitmen perusahaan dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Dukungan ini secara langsung memperkuat struktur ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan semata.

Dengan adanya pengembangan UMKM ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan penghasilan tambahan, tetapi juga memperoleh keterampilan dan jaringan bisnis yang menjadi modal penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan PT Vale turut mendorong terciptanya ekosistem ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Program ini dirancang agar pelaku usaha kecil dapat meningkatkan kapasitas usahanya, baik dari segi produksi, manajemen, maupun pemasaran, sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Fokus utamanya adalah memberikan dukungan kepada UMKM agar bisa tumbuh berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja baru, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui penguatan UMKM, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga produsen yang aktif berkontribusi pada pembangunan ekonomi.

Tabel produk UMKM

No	Jenis produk	Nama produk	Jumlah peserta
1.	Produk obat herbal organik	Sijale (minuman herbal ketahanan tubuh), Sirtela (untuk Kesehatan pencernaan), Wedang sapu jagat, wedang dewi, wedang dewa, Kunyit asam sirih.	43 peserta
2.	Produk Pangan	Kopi kampung, Nata de coco, ikan asap.	20 peserta



Berdasarkan Pengembangan UMKM yang difasilitasi PT Vale memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui dukungan

pelatihan, pendampingan usaha, serta akses permodalan, pelaku UMKM mampu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan keterampilan manajemen. Hal ini berdampak pada peningkatan daya saing usaha di pasar lokal maupun luar daerah. Pengembangan UMKM tidak hanya menambah penghasilan pelaku usaha, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan di tingkat desa.

#### 4. Pemahaman Bersama

Pemahaman Bersama merupakan kesepahaman kolektif antara semua pihak yang terlibat mengenai tujuan, nilai-nilai, masalah, dan strategi yang akan diambil dalam proses kolaborasi. Ini bukan sekadar saling mengetahui apa yang dilakukan masing-masing pihak, tetapi mencakup kesepakatan mendalam atas arah kerja sama, harapan yang ingin dicapai, serta cara-cara penyelesaian masalah yang disetujui bersama. Dalam proses kolaboratif, pemahaman bersama menjadi landasan untuk menghindari kesalahanpahaman, konflik kepentingan, dan ketimpangan kekuasaan antar aktor.

Dalam hal ini berarti semua pihak memiliki persepsi yang sama bahwa tujuan akhir dari kolaborasi adalah untuk mewujudkan green economy secara berkelanjutan. Artinya, program yang dijalankan harus tetap memperhatikan lingkungan, keadilan sosial, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Misalnya, masyarakat dan pemerintah perlu memahami bahwa program yang dilakukan perusahaan tidak semata demi keuntungan bisnis, tetapi juga menciptakan manfaat sosial dan ekologis jangka panjang.

Hal ini ditegaskan oleh pihak PT.Vale :

“Kami di PT Vale selalu menekankan bahwa tujuan program-program kolaboratif bukan hanya soal bisnis atau tanggung jawab perusahaan, tapi bagian dari komitmen kami untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Itu sebabnya sejak awal kami selalu duduk bersama dengan pemerintah desa, kecamatan, dan masyarakat, agar semua memahami bahwa arah kerja sama ini mengacu pada prinsip keberlanjutan green economy yang berkeadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Kami ingin semua pihak sadar bahwa keberhasilan program hanya bisa dicapai kalau ada visi dan pemahaman yang sama.”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa PT.Vale memiliki komitmen kuat untuk membangun pemahaman bersama sebagai fondasi utama dalam tata kelola kolaboratif. Sikap perusahaan yang secara aktif melibatkan pemerintah desa, kecamatan, dan masyarakat sejak awal proses menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengejar kepentingan bisnis atau kewajiban korporasi, tetapi juga berusaha menciptakan keselarasan visi di antara semua pihak yang terlibat. Penekanan pada prinsip *green economy* yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan lingkungan memperlihatkan bahwa PT.Vale menyadari pentingnya menyatukan persepsi, nilai, dan arah tujuan dalam setiap program kolaboratif yang dijalankan.

Dengan membangun kesepahaman secara kolektif, PT.Vale tidak hanya mencegah potensi konflik atau kesalahpahaman antar pihak, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap program-program yang diinisiasi. Ketika semua pemangku kepentingan berbagi visi yang sama, maka proses kolaborasi akan berlangsung lebih efektif, terkoordinasi, dan berdampak jangka panjang. Selain itu, hal ini juga menciptakan ruang dialog yang lebih sehat dan konstruktif, di mana setiap keputusan yang diambil benar-benar mewakili kebutuhan dan harapan bersama.

Pemerintah Kecamatan Bungku Timur mengatakan :

“Kami menekankan bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya dengan anggaran atau kegiatan fisik yang terlihat, tapi juga harus ada kesepahaman nilai. bahwa program ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Semua pihak, termasuk masyarakat, harus menyadari bahwa prinsip-prinsip *green economy* seperti pelestarian lingkungan dan pemberdayaan sosial adalah dasar dari kerja sama ini. Setiap pertemuan musyawarah, kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa program dari PT Vale bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, melainkan juga untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan. Ketika pemahaman ini disampaikan secara terbuka, masyarakat pun lebih mudah menerima dan ikut mendukung program.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak pemerintah kecamatan memiliki kesadaran konseptual yang kuat terhadap pentingnya membangun *pemahaman bersama* dalam pelaksanaan program kolaboratif. Mereka tidak hanya fokus pada aspek teknis atau administratif seperti alokasi anggaran dan pembangunan fisik, tetapi juga menekankan bahwa keselarasan nilai dan visi antar aktor adalah fondasi utama dari keberhasilan program. Pandangan ini menggambarkan peran kecamatan bukan sekadar sebagai penghubung struktural, tetapi sebagai penjaga arah kolaborasi agar tetap sesuai dengan prinsip *green economy* yang menekankan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

Komunikasi terbuka dalam setiap forum musyawarah mencerminkan komitmen pihak kecamatan untuk terus menyampaikan kepada masyarakat bahwa program yang dijalankan memiliki dimensi sosial dan ekologis jangka panjang, bukan hanya kepentingan sesaat perusahaan. Dengan terus membangun kesadaran kolektif ini, pihak kecamatan berperan penting dalam mengurangi potensi konflik, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, dan memperkuat kepercayaan antar pihak. Narasi ini juga memperlihatkan bahwa pemahaman bersama bukan sesuatu yang terbentuk secara otomatis, tetapi hasil dari proses komunikasi yang terus-

menerus dan intensional.

Pemerintah Desa Bahomotefe mengatakan :

“Dalam setiap pertemuan dengan PT.Vale dan pemerintah kecamatan, kami selalu berdiskusi lebih dulu tentang apa tujuan program, manfaatnya bagi masyarakat, serta bagaimana teknis pelaksanaannya nanti. Kalau semua pihak sudah paham dan sepakat dengan tujuan dan nilai-nilainya, maka pelaksanaan program akan lebih mudah, dan hasilnya lebih bermanfaat. Sebagai pemerintah desa, kami merasa bertanggung jawab untuk menjaga agar persepsi dan arah kerja sama ini tetap satu suara.”

Pemerintah desa memainkan peran strategis dalam memastikan terciptanya pemahaman bersama antar seluruh pemangku kepentingan dalam program kolaboratif. Keterlibatan aktif mereka dalam setiap pertemuan dengan PT.Vale dan pemerintah kecamatan menunjukkan komitmen untuk tidak hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi juga sebagai penjaga arah dan nilai kerja sama. Dengan membahas secara terbuka tujuan, manfaat, dan teknis pelaksanaan program, pemerintah desa mendorong terciptanya ruang dialog yang inklusif dan setara.

Pentingnya kesepahaman sejak awal ditegaskan sebagai kunci kelancaran implementasi program. Jika semua pihak telah memahami dan menyepakati nilai-nilai dasar seperti keberlanjutan, partisipasi, dan keadilan sosial, maka berbagai potensi kesalahpahaman, resistensi, atau konflik dapat diminimalisir. Pemerintah desa, dalam hal ini, menempatkan diri sebagai penjaga konsistensi arah kolaborasi, agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan visi bersama yang telah dirumuskan.

Masyarakat Desa Onepute jaya mengatakan :

“Dalam setiap pertemuan, kami dijelaskan bahwa program tujuannya bukan cuma bantu masyarakat, tapi juga menjaga lingkungan dan meningkatkan

ekonomi secara berkelanjutan. program-program yang dijalankan PT Vale itu tidak sekadar bantuan sesaat, tapi memang dirancang untuk jangka panjang. Seperti program pengelolaan sampah, Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga diarahkan sebagai langkah kesadaran Masyarakat dalam memilah sampah untuk membangun kesadaran ekologis masyarakat lokal.”

Masyarakat lokal mulai memiliki pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap arah serta tujuan program-program yang dijalankan oleh PT.Vale. Mereka tidak lagi memandang program hanya sebagai bentuk bantuan jangka pendek, melainkan sebagai upaya jangka panjang yang terintegrasi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Program seperti pengelolaan sampah, misalnya, dipahami tidak hanya sebagai cara membersihkan lingkungan, tetapi juga sebagai strategi untuk membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga ekosistem hidup secara berkelanjutan. Ini menunjukkan adanya transformasi cara pandang masyarakat terhadap intervensi program. dari yang sebelumnya bersifat pasif menjadi lebih aktif, kritis, dan partisipatif.

Keberhasilan PT.Vale dalam menyampaikan nilai dan arah dari setiap program kepada masyarakat, sekaligus membuktikan bahwa pemahaman bersama dan kesinambungan program menjadi kunci dalam mewujudkan kolaborasi yang bermakna. Ketika masyarakat memahami esensi dari program, maka kepercayaan, komitmen, dan partisipasi pun akan tumbuh secara alami dan berkelanjutan.

## 5. Hasil antara

Hasil antara merupakan indikator akhir dalam proses *tata kelola kolaboratif* yang merujuk pada pencapaian-pencapaian sementara yang muncul selama proses kolaborasi berlangsung. Hasil ini belum mencerminkan tujuan akhir secara

keseluruhan, tetapi menjadi penanda penting bahwa kolaborasi berjalan ke arah yang benar. Dalam konteks mewujudkan *green economy*, hasil antara bisa berupa terbentuknya kesepahaman antar aktor, meningkatnya partisipasi masyarakat, kepercayaan yang mulai tumbuh, atau dimulainya pelaksanaan program-program kecil yang menjadi fondasi dari agenda jangka panjang.

Hasil antara menjadi indikator keberhasilan proses karena mencerminkan adanya kemajuan nyata dari kerja sama yang telah dibangun. Misalnya, di kawasan PT.Vale IGP Morowali, hasil antara bisa dilihat dari adanya kolaborasi awal dalam pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan, pelatihan masyarakat dalam pertanian berkelanjutan, terbentuknya forum desa yang aktif menyuarakan aspirasi, atau adanya kesepakatan bersama antara perusahaan dan pemerintah desa dalam pelaksanaan program sosial. Walaupun program-program tersebut belum mencapai dampak jangka panjang, keberadaannya menunjukkan bahwa kolaborasi telah menciptakan hasil yang dapat diukur dan dirasakan oleh para pihak.

Pihak PT.VALE menegaskan :

“Keberhasilan dalam berkolaborasi bisa dilihat dari forum musyawarah desa dan konsultasi publik yang dijalankan dengan sangat baik hingga saat ini, sehingga dalam pelaksanaan program akan berjalan dengan baik juga kedepannya. Dan partisipasi atau Kerjasama dari semua pihak yang menjadikan hasil program yang kami laksanakan itu sesuai dengan harapan awal perencanaan kita.”

Keberhasilan kolaborasi dalam tata kelola program sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi dan partisipasi dalam forum-forum dialog seperti musyawarah desa dan konsultasi publik. Forum ini menjadi ruang strategis di mana semua pihak, baik perusahaan, pemerintah, maupun Masyarakat. dapat menyampaikan pendapat, menyusun rencana bersama, dan membangun pemahaman kolektif atas tujuan

program. Ketika ruang dialog ini dijalankan secara terbuka dan inklusif, maka kepercayaan tumbuh, komitmen meningkat, dan pelaksanaan program menjadi lebih tepat sasaran.

Pentingnya partisipasi semua pihak juga terlihat dalam hasil program yang disebut “sesuai dengan harapan awal.” Hal ini menunjukkan bahwa program bukan hanya menjadi milik perusahaan atau pemerintah, tetapi juga mencerminkan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses kolaboratif yang sehat. bukan karena salah satu pihak dominan, melainkan karena adanya sinergi yang terbangun sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Pemerintah Kecamatan Bungku Timur juga mengatakan :

“Jadi selama proses kolaborasi berbagai program yang kami laksanakan ini, semua pihak selalu berjalan dalam satu arah. PT Vale selalu melibatkan semua pihak dari awal perencanaan hingga pelaksanaannya. Hal itu berdampak sehingga hasil program dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat saat ini. Jadi keberhasilan itu bukan hanya soal hasil akhirnya, tapi bagaimana prosesnya melibatkan semua pihak secara adil dan terbuka.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya diukur dari hasil akhir berupa produk atau output program, tetapi lebih dalam lagi terletak pada proses yang inklusif, terbuka, dan adil. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif semua pihak sejak tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan menjadi kunci utama. PT.Vale dinilai telah menunjukkan komitmen kuat untuk menjadikan kolaborasi sebagai pendekatan utama, bukan sekadar strategi komunikasi, dengan melibatkan pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat lokal secara menyeluruh.

Ketika semua pihak berjalan dalam satu tujuan yang telah disepakati, maka hasil program pun tidak hanya terasa lebih tepat sasaran, tetapi juga mendapatkan

legitimasi dari masyarakat sebagai penerima manfaat langsung.

Pemerintah Desa Geresa juga mengatakan :

“Hasil kolaborasi yang telah kami rasakan itu dapat dilihat dari keberhasilan semua program yang telah dilaksanakan. Ketika komunikasi lancar dan tidak ada yang merasa ditinggalkan, hasil program pun jadi lebih maksimal. Contohnya, program pelatihan UMKM, Pengembangan obat herbal dan jalan tani bisa berjalan sesuai harapan karena ada koordinasi yang baik dan peran aktif semua pihak. Tercapainya keberhasilan tersebut itu dikarenakan semua pihak saling mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program.”

Hasil wawancara tersebut mencerminkan bahwa keberhasilan program kolaboratif antara PT.Vale, pemerintah, dan masyarakat tidak hanya bergantung pada substansi program itu sendiri, tetapi terutama pada kualitas hubungan antar pihak. Komunikasi yang terbuka, koordinasi yang solid, dan partisipasi aktif menjadi kunci utama yang memungkinkan program berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Ketika tidak ada pihak yang merasa ditinggalkan dalam proses, maka rasa memiliki terhadap program pun meningkat, sehingga pelaksanaannya lebih mudah diterima dan dijalankan bersama.

Contoh keberhasilan seperti pelatihan UMKM, pengembangan obat herbal, pembangunan jalan tani. menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi yang sehat mampu menghasilkan dampak yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga menyentuh kebutuhan nyata warga karena prosesnya melibatkan semua elemen secara aktif. Peran aktif dari pemerintah desa, kecamatan, perusahaan, dan masyarakat saling melengkapi untuk memastikan setiap tahapan dari perencanaan hingga implementasi berjalan sesuai harapan bersama.

Masyarakat Desa Geresa mengatakan :

“Menurut kami, program-program dari PT.Vale selama ini terasa manfaatnya karena dari awal kami sebagai masyarakat selalu dilibatkan. Seperti dalam program pengembangan obat herbal semua pihak saling kerja sama, hasilnya pun bisa dinikmati bersama. Dengan begitu, kami merasa tidak hanya sebagai penerima manfaat, tapi juga sebagai bagian dari pelaksana. Ini membuat kami lebih semangat menjaga dan melanjutkan programnya karena merasa memiliki. Harapannya, program seperti ini bisa terus dikembangkan agar masyarakat bisa lebih mandiri secara ekonomi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelibatan aktif masyarakat sejak awal merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program-program kolaboratif yang dijalankan oleh PT.Vale, khususnya dalam konteks pengembangan obat herbal. Ketika masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat langsung dalam perencanaan, pelatihan, hingga pelaksanaan program, maka tumbuh rasa kepemilikan yang kuat terhadap inisiatif tersebut. Hal ini berkontribusi pada semangat untuk menjaga keberlanjutan program, karena masyarakat merasa bahwa mereka turut andil dalam proses dan hasilnya.

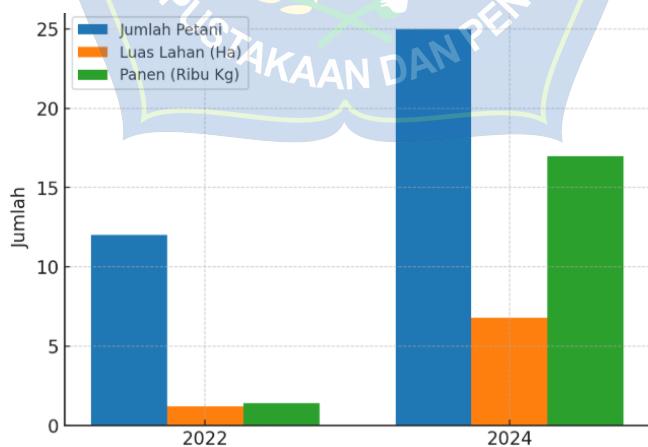
Kolaborasi lintas pihak yang disebutkan dalam wawancara juga mencerminkan praktik tata kelola kolaboratif yang ideal, di mana perusahaan, pemerintah, dan warga saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Manfaat yang dirasakan tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga menyentuh aspek ekologis dan sosial. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari output berupa produk atau pelatihan, melainkan juga dari terbangunnya kesadaran kolektif untuk melanjutkan dan mengembangkan program ke arah yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan. yakni pihak PT.Vale,

pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat lokal. dapat disimpulkan bahwa proses kolaboratif dalam tata kelola program berbasis green economy di kawasan PT Vale IGP Morowali telah menghasilkan sejumlah *hasil antara* yang signifikan. Salah satu capaian utama adalah meningkatnya kualitas forum dialog seperti musyawarah desa dan konsultasi publik yang menjadi wadah komunikasi terbuka dan partisipatif antar pihak. Forum ini berhasil menyatukan pandangan, membangun kesepahaman, serta menciptakan kepercayaan timbal balik antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Di sisi lain, pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan program seperti pelatihan UMKM, pertanian organik, pengelolaan sampah, restorasi wilayah pesisir dan pengembangan obat herbal menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi menjadi objek, melainkan mitra aktif dalam pelaksanaan program.

Hasil antara berbagai program kolaboratif PT Vale :

#### *Peningkatan luas lahan dan hasil produksi padi organik*

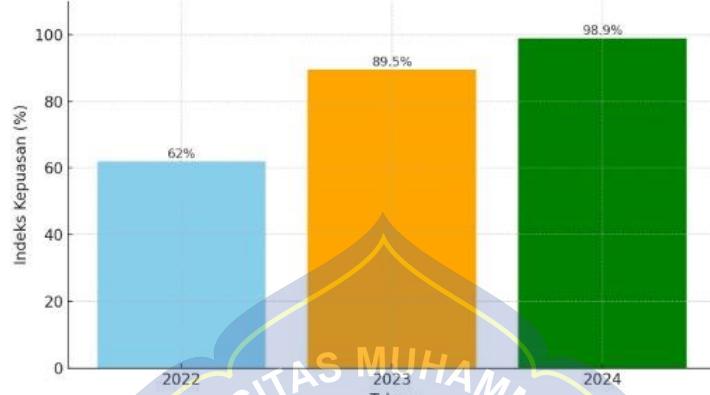


Dari data di atas menunjukkan pada tahun 2022 jumlah petani sebanyak 12 orang dengan total lahan garap seluas 1,2 hektar (Ha). Di 2024, tumbuh menjadi 25 petani dengan total luas lahan garap mencapai sekitar 6,8 hektar (Ha). Dari jumlah tersebut

panen padi organic mencapai rekor 17,6 ribu kilogram.

### ***Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pukesmas bohemotefe***

Indeks Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas Bahomotefe (2022-2024)



Dari diagram di atas menunjukkan bahwa indeks kepuasan konsumen terhadap pelayanan dan fasilitas pukesmas menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 sebanyak 62%, tahun 2023 sebanyak 89,5%, dan pada tahun 2024 sebanyak 98,9%. Hal ini dikarenakan renovasi fasilitas yang di lakukan oleh PT Vale untuk kenyamanan Masyarakat.

Keberhasilan program dapat terlihat dari tingginya partisipasi semua pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah kecamatan, desa, hingga pihak perusahaan. Hasil data menunjukkan bahwa setiap program yang dijalankan mendapatkan dukungan aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Masyarakat terlibat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan, sehingga program dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang memastikan koordinasi berjalan lancar dan kebijakan desa mendukung keberlangsungan program. Sementara itu, perusahaan berkontribusi melalui pendampingan teknis, penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan pendanaan.

Sinergi ini menghasilkan pencapaian nyata, seperti peningkatan jumlah petani yang mengadopsi metode pertanian organik, perluasan lahan garapan, serta peningkatan produktivitas dan kualitas hasil panen. Setiap program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga menekankan pada keberlanjutan dan kemandirian masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kolaborasi yang solid antara semua pihak menjadi faktor kunci dalam mencapai keberhasilan yang terukur dan berdampak positif bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari adanya kesepahaman bersama bahwa tujuan utama kolaborasi ini adalah untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan pelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Semua pihak menunjukkan komitmen nyata dan konsistensi dalam peran masing-masing, baik sebagai pelaksana, fasilitator, maupun pengawas. Dengan demikian, hasil-hasil awal ini menjadi fondasi penting bagi keberhasilan jangka panjang kolaborasi dan merupakan indikator kuat bahwa proses yang dijalankan telah bergerak ke arah yang benar.

### C. Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa tata kelola kolaboratif dalam mewujudkan *green economy* di kawasan PT.Vale IGP Morowali bukan hanya sekadar koordinasi formal antar-lembaga, tetapi merupakan sebuah proses interaksi dinamis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pemerintah, perusahaan, masyarakat lokal dalam satu ruang kolaborasi. Proses ini dibangun di atas prinsip keterbukaan informasi, partisipasi aktif, serta kesediaan semua pihak untuk bekerja sama dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program yang

berorientasi pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan kolaborasi ini dapat dianalisis menggunakan lima indikator utama yang menjadi pondasi dalam teori *collaborative governance*, yaitu Dialog tatap muka, menjadi titik awal terbangunnya hubungan kerja yang produktif. Dalam konteks PT.Vale IGP Morowali, forum diskusi, rapat koordinasi, dan pertemuan terbuka menjadi sarana di mana semua pihak dapat mengemukakan pandangan, mengklarifikasi kepentingan, dan mencari titik temu. Melalui pertemuan langsung, hambatan komunikasi dapat diminimalisir, sehingga kesalahpahaman dapat dihindari dan solusi dapat dirumuskan secara kolektif. Membangun kepercayaan, Kepercayaan dibangun secara bertahap melalui transparansi informasi, konsistensi tindakan, dan adanya bukti nyata dari komitmen masing-masing pihak. Masyarakat mulai percaya kepada perusahaan ketika program lingkungan yang dijanjikan benar-benar dijalankan, sementara perusahaan percaya pada masyarakat saat mereka turut aktif menjaga hasil program tersebut. Kepercayaan menjadi “modal sosial” yang membuat kolaborasi dapat bertahan dalam jangka panjang.

Komitmen terhadap proses, Komitmen ditunjukkan melalui kesediaan semua pihak untuk terus terlibat secara aktif, meskipun proses kolaborasi memerlukan waktu panjang dan menghadapi tantangan. Di PT.Vale IGP Morowali, komitmen ini tercermin dari kehadiran rutin dalam forum diskusi, kontribusi sumber daya (waktu, tenaga, dana), dan kesediaan menyesuaikan kebijakan atau program demi mencapai tujuan bersama. Pemahaman bersama, berarti semua pihak memiliki persepsi dan visi yang relatif selaras mengenai tujuan kolaborasi, meskipun latar

belakang dan kepentingannya berbeda. Dalam kasus ini, pemahaman bahwa *green economy* tidak hanya menyelamatkan lingkungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan menjadi titik persamaan yang menyatukan berbagai aktor. Pemahaman ini biasanya terbentuk setelah proses dialog yang intens dan penyamaan persepsi terkait fakta, data, dan tantangan lapangan.

Yang terakhir yaitu Hasil Antara merupakan capaian sementara yang menunjukkan bahwa proses kolaboratif berjalan ke arah yang benar. Misalnya, terbentuknya forum komunikasi rutin, meningkatnya kapasitas masyarakat melalui pelatihan, adanya proyek restorasi ekosistem, atau pengelolaan sampah berbasis desa. Hasil ini belum merupakan tujuan akhir, tetapi berfungsi sebagai motivasi untuk mempertahankan kolaborasi dan bukti bahwa kerja sama yang dilakukan membawa dampak positif nyata.

#### 1. Dialog tatap muka

Ansell & Gash (2008) menegaskan bahwa *dialog tatap muka* adalah fondasi utama dalam membangun kolaborasi yang efektif karena interaksi langsung memberikan ruang untuk membangun saling pengertian, mengidentifikasi perbedaan pandangan, dan mengurangi risiko kesalahpahaman antar pemangku kepentingan. PT.Vale IGP Morowali, mewujudkan mekanisme dialog ini melalui musyawarah desa, konsultasi publik, dan pertemuan koordinasi lintas sektor yang melibatkan perusahaan, pemerintah kecamatan Bungku Timur, pemerintah desa, serta masyarakat.

Melalui forum-forum ini, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan jelas, kebutuhan lokal diidentifikasi secara kolektif, dan rencana kerja dirumuskan

berdasarkan musyawarah mufakat. Keberadaan forum ini menjadi simbol dari komitmen bersama untuk membangun komunikasi yang sehat dan membentuk dasar kerja sama jangka panjang yang adil dan inklusif. Keefektifan forum dialog ini terlihat dari tingginya tingkat partisipasi semua pihak dalam setiap tahapan diskusi. PT.Vale tidak hanya hadir sebagai fasilitator, tetapi juga memberikan ruang dan waktu bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk menyampaikan gagasan, kritik, maupun masukan atas program yang direncanakan.

Dalam hasil temuan Pemerintah kecamatan berperan sebagai penyeimbang dan penghubung antar desa, sekaligus menjaga agar keputusan yang diambil berada dalam koridor kebijakan daerah. Pemerintah desa menjadi corong aspirasi warganya dan ikut aktif memastikan bahwa program yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Proses ini memperlihatkan bahwa dialog tatap muka bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga menjadi wahana penguatan hubungan sosial, pembentukan kepercayaan, dan pelembagaan nilai-nilai kolaborasi.

Lebih dari itu, ruang dialog yang terbentuk melalui forum-forum resmi ini juga berfungsi sebagai ruang belajar antar aktor. Masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai arah program pembangunan yang diusung perusahaan dan pemerintah, serta menyadari pentingnya keterlibatan aktif mereka dalam setiap proses. Sebaliknya, PT.Vale dan pemerintah mendapatkan pengetahuan lokal yang otentik dari masyarakat mengenai potensi desa, tantangan sosial, dan nilai-nilai kultural yang perlu dihormati dalam pelaksanaan program. Pertukaran pengetahuan ini memperkuat sinergi dan memperluas kapasitas

kolaborasi di tingkat lokal. Dialog tatap muka tidak hanya menciptakan kesepakatan teknis, tetapi juga membangun kesadaran kolektif yang menjadi energi penting dalam mendorong keberhasilan program berbasis green economy.

Dengan demikian, berdasarkan korelasi antara teori tata kelola kolaboratif menurut *Ansell & Gash (2008)* dan temuan lapangan di kawasan PT.Vale IGP Morowali, dapat dijelaskan bahwa dialog tatap muka yang dilakukan secara rutin melalui forum koordinasi, rapat terbuka, dan pertemuan lintas pemangku kepentingan telah menjadi landasan utama dalam membangun komunikasi yang efektif. Forum ini memungkinkan setiap pihak pemerintah, perusahaan, Masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengklarifikasi informasi, serta merumuskan solusi bersama.

## 2. Membangun kepercayaan

Dalam teori *collaborative governance*, kepercayaan dipandang sebagai modal sosial utama yang menjadi prasyarat keberlanjutan kolaborasi. *Ansell & Gash (2008)* menekankan bahwa kepercayaan tidak dapat terbentuk secara instan, melainkan dibangun melalui proses panjang yang melibatkan konsistensi tindakan, keterbukaan informasi, serta kemampuan merespons kebutuhan pihak lain secara tepat dan memuaskan. Kepercayaan yang kuat mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk lebih terbuka, mau berbagi informasi, dan bersedia mengambil keputusan bersama tanpa rasa curiga yang berlebihan.

Temuan penelitian di PT.Vale IGP Morowali menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan prinsip ini melalui berbagai cara. PT.Vale secara rutin membuka informasi terkait program yang sedang dan akan dijalankan, termasuk

memaparkan tujuan, sasaran, anggaran, dan progres kegiatan kepada pemerintah dan masyarakat. Laporan hasil program disampaikan dalam forum formal seperti rapat desa atau pertemuan koordinasi, sehingga semua pihak mendapatkan informasi yang sama. Hal ini selaras dengan pernyataan salah satu informan dari pemerintah desa yang mengatakan bahwa “PT.Vale tidak hanya datang membawa program, tetapi juga mau menjelaskan secara rinci apa, untuk siapa, dan bagaimana pelaksanaannya.”

Selain keterbukaan informasi, respons cepat terhadap aspirasi masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan. masyarakat menunjukkan bahwa ketika ada usulan atau keluhan yang disampaikan, pihak perusahaan segera melakukan survei lapangan untuk menilai kelayakan dan urgensinya. Tindak lanjut yang cepat ini memberikan kesan bahwa perusahaan serius mendengar dan menghargai masukan warga. Peran pemerintah desa dan kecamatan juga signifikan dalam menjaga kepercayaan. Mereka menjadi jembatan informasi antara perusahaan dan masyarakat, memastikan bahwa pesan dan data yang diterima kedua belah pihak konsisten. Fungsi ini mencegah terjadinya kesenjangan informasi atau salah tafsir yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan. Konsistensi dalam keterbukaan, transparansi, dan tanggapan terhadap aspirasi inilah yang membuat masyarakat merasa menjadi mitra sejajar dalam proses pembangunan, bukan hanya objek penerima manfaat. Pada akhirnya, legitimasi sosial PT.Vale semakin menguat karena hubungan yang dibangun didasarkan pada rasa saling menghargai dan saling percaya, yang menurut teori Ansell & Gash, menjadi pendorong utama keberhasilan kolaborasi jangka panjang.

PT.Vale selalu memastikan bahwa setiap program dijalankan sesuai prosedur, serta merespons cepat usulan dan keluhan yang disampaikan melalui forum resmi. Pemerintah desa dan kecamatan berperan sebagai penghubung informasi untuk memastikan semua pihak mendapatkan informasi yang sama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepercayaan tidak muncul secara instan, tetapi dibentuk melalui konsistensi tindakan dan keterbukaan. Hal ini memperkuat temuan bahwa kepercayaan merupakan modal sosial penting dalam mempertahankan keberlanjutan kolaborasi. Di Morowali, kepercayaan ini membuat masyarakat lebih aktif berpartisipasi dan mendorong keberhasilan program keberlanjutan.

Dengan demikian, berdasarkan korelasi antara teori tata kelola kolaboratif menurut Ansell & Gash (2008) dan temuan lapangan di kawasan PT.Vale IGP Morowali, dapat dijelaskan bahwa membangun kepercayaan merupakan proses kunci yang menjadi pengikat hubungan antar-pemangku kepentingan. Dalam kerangka teori, kepercayaan dibangun melalui interaksi berulang yang konsisten, transparansi informasi, serta bukti nyata dari komitmen masing-masing pihak. Di lapangan, hal ini terlihat dari keterbukaan PT.Vale dalam menyampaikan rencana dan hasil program lingkungan, seperti pengelolaan limbah, rehabilitasi lahan pascatambang, serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal.

### 3. Komitmen terhadap proses

Ansell & Gash (2008) menegaskan bahwa *komitmen terhadap proses* merupakan salah satu indikator penting dalam *collaborative governance* karena kolaborasi yang efektif memerlukan keterlibatan aktif seluruh pihak secara

berkelanjutan, bukan hanya pada tahap awal pembentukan kerja sama. Komitmen ini meliputi kemauan untuk terus hadir dalam pertemuan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mengalokasikan sumber daya, serta menjalankan kesepakatan yang telah dibuat hingga tujuan bersama tercapai. Tanpa komitmen yang konsisten, inisiatif kolaborasi berisiko terhenti sebelum menghasilkan dampak yang signifikan.

Komitmen dalam tata kelola kolaboratif bukan sekadar pernyataan formal atau kehadiran simbolis dalam forum-forum musyawarah, tetapi tercermin dalam tindakan nyata yang dilakukan oleh seluruh pihak selama proses pelaksanaan program. Komitmen ini tampak jelas dari keterlibatan PT.Vale yang tidak hanya menyediakan pendanaan sebagai bentuk kontribusi finansial, tetapi juga terlibat aktif dalam pengawasan teknis, pelaporan perkembangan, hingga penyusunan strategi evaluasi. Setiap program yang dijalankan dikawal dengan serius, baik dalam hal administrasi, pelibatan stakeholder lokal, maupun penyesuaian program agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memandang kolaborasi bukan sebagai kewajiban semata, tetapi sebagai proses strategis untuk menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pemerintah desa dan kecamatan juga memainkan peran penting dalam menunjukkan komitmennya terhadap proses kolaboratif ini. Di tingkat desa, aparat pemerintah secara aktif mengawal jalannya program dengan terlibat dalam verifikasi usulan, membantu proses pelaksanaan teknis, serta memastikan bahwa program sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Sementara pemerintah

kecamatan menjadi penghubung lintas desa, menjembatani komunikasi antara masyarakat dan perusahaan, serta mengawal agar pelaksanaan program tetap sejalan dengan arah pembangunan daerah. Keterlibatan mereka bukan hanya pada aspek administratif, melainkan juga pada pengawasan langsung di lapangan, pendampingan sosial, dan fasilitasi dialog antar pihak ketika terjadi kendala. Ini membuktikan bahwa keberhasilan program bergantung pada kolaborasi aktif dan komitmen bersama di setiap tingkat pemerintahan.

Di sisi lain, masyarakat lokal menunjukkan bentuk komitmennya dengan turut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tindak lanjut program. Mereka hadir dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan, membantu pelaksanaan program seperti pembangunan jalan tani atau pengembangan usaha mikro, serta menjaga kelangsungan program setelah kegiatan utama selesai. Partisipasi masyarakat ini tidak hanya memperkuat efektivitas program, tetapi juga menjadi cerminan bahwa mereka merasa memiliki inisiatif tersebut. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai, maka komitmen mereka tumbuh secara alami dan berkelanjutan. Hal ini menjadikan kolaborasi yang terbangun tidak bersifat sementara, melainkan menjadi sistem kerja bersama yang melembaga dan bertahan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, berdasarkan korelasi antara teori tata kelola kolaboratif menurut Ansell & Gash (2008) dan temuan lapangan di kawasan PT.Vale IGP Morowali, dapat dijelaskan bahwa komitmen terhadap proses merupakan elemen yang memastikan kolaborasi berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam kerangka teori, komitmen ditunjukkan melalui kesediaan semua pihak untuk terus

terlibat aktif, memberikan kontribusi sumber daya, dan mempertahankan kerja sama meski dihadapkan pada tantangan teknis, perbedaan kepentingan, atau keterbatasan waktu.

#### 4. Pemahaman Bersama

Dalam kerangka teori *collaborative governance*, Ansell & Gash (2008) menekankan bahwa Pemahaman Bersama merupakan elemen penting untuk memastikan keberhasilan kolaborasi. Kesepahaman ini berarti seluruh pihak yang terlibat memiliki persepsi, pandangan, dan orientasi tujuan yang sama terhadap arah kerja dan hasil yang ingin dicapai. Tanpa adanya kesepahaman, kolaborasi rentan mengalami benturan kepentingan, tarik-menarik kepentingan pribadi atau kelembagaan, dan miskomunikasi yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan bersama.

Pemahaman bersama menjadi fondasi penting dalam keberhasilan tata kelola kolaboratif, karena memastikan bahwa seluruh aktor memiliki persepsi, orientasi, dan nilai yang sejalan dalam setiap tahapan kerja sama. kolaborasi antara PT.Vale, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal, terdapat kesepahaman yang kuat bahwa tujuan utama dari program yang dijalankan adalah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang berprinsip pada *green economy*. Artinya, kolaborasi ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi target-target ekonomi semata, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan dampak sosial yang adil dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Kesepahaman ini membuat setiap pihak tidak hanya bekerja berdasarkan kepentingannya sendiri, tetapi mampu menyesuaikan langkah-langkahnya demi mencapai tujuan bersama.

Kesadaran kolektif ini dibangun melalui proses komunikasi yang rutin dan terbuka, baik dalam forum formal seperti musyawarah desa, maupun dalam konsultasi teknis antara pihak perusahaan dan pemerintah. Dalam setiap dialog, PT Vale secara konsisten menyampaikan bahwa program-program yang mereka bawa bukan sekadar bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga merupakan bentuk nyata kontribusi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan daerah. Pemerintah kecamatan dan desa turut memainkan peran penting dalam memperkuat pemahaman ini, dengan menjelaskan manfaat jangka panjang dari program yang dijalankan kepada masyarakat. Nilai-nilai seperti pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan keadilan distribusi manfaat menjadi pesan utama yang terus didorong agar tertanam dalam kesadaran kolektif warga.

Adanya kesepahaman ini juga menciptakan iklim kolaborasi yang lebih sehat dan produktif. Ketika semua pihak memahami arah kerja sama dan memiliki tujuan yang sama, maka potensi konflik dapat ditekan, dan koordinasi dapat berjalan lebih efisien. Dalam berbagai program seperti pelatihan pertanian organik, pengelolaan sampah, atau pengembangan UMKM lokal, kesepahaman ini memungkinkan pembagian peran yang jelas dan partisipasi yang aktif. Masyarakat tidak lagi melihat program sebagai sesuatu yang datang dari luar, melainkan sebagai bagian dari usaha bersama yang mereka miliki dan jaga. Dengan begitu, pemahaman bersama tidak hanya menjadi syarat administratif dalam kolaborasi, tetapi benar-benar berfungsi sebagai energi sosial yang menggerakkan seluruh proses menuju keberhasilan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, berdasarkan korelasi antara teori tata kelola kolaboratif

menurut Ansell & Gash (2008) dan temuan lapangan di kawasan PT.Vale IGP Morowali, dapat dijelaskan bahwa pemahaman ini mulai terbentuk ketika semua pihak pemerintah daerah, PT.Vale IGP Morowali, masyarakat menyadari bahwa *green economy* bukan hanya kepentingan perusahaan, tetapi juga kebutuhan kolektif yang berdampak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan warga.

### 5. Hasil antara

Dalam kerangka teori *collaborative governance*, Ansell & Gash (2008) menjelaskan bahwa hasil antara (*intermediate outcomes*) merupakan capaian awal yang berfungsi sebagai indikator bahwa kolaborasi berjalan ke arah yang benar. Hasil ini penting karena menjadi tolok ukur keberhasilan sementara yang dapat memotivasi semua pihak untuk melanjutkan proses kolaborasi. Keberhasilan awal biasanya meningkatkan rasa percaya diri antar pihak, memperkuat kepercayaan (*trust building*), dan mengurangi keraguan terhadap efektivitas kerja sama.

Hasil antara merupakan indikator penting yang menunjukkan bahwa proses tata kelola kolaboratif telah berjalan ke arah yang benar meskipun belum mencapai tujuan akhir sepenuhnya. Dalam konteks mewujudkan *green economy* di kawasan PT.Vale IGP Morowali, hasil antara terlihat dari munculnya praktik-praktik kolaborasi yang konkret, seperti terbentuknya forum musyawarah desa dan konsultasi publik yang berjalan secara aktif dan efektif. Forum ini menjadi ruang strategis tempat semua aktor PT.Vale, pemerintah kecamatan dan desa, serta Masyarakat bertemu, berdialog, dan menyusun rencana program secara partisipatif. Keberadaan forum ini menandai tumbuhnya kepercayaan dan komitmen bersama dalam proses perumusan dan pelaksanaan program.

Keberhasilan forum dialog ini diperkuat dengan meningkatnya partisipasi masyarakat yang tidak lagi bersifat pasif sebagai penerima manfaat, tetapi berperan aktif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Hal ini tampak dalam pelaksanaan program-program seperti pengembangan obat herbal, pelatihan UMKM, pembangunan jalan tani, pertanian organik, hingga pengelolaan sampah. Keterlibatan masyarakat yang tinggi menunjukkan adanya rasa memiliki terhadap program yang dijalankan, yang merupakan hasil dari komunikasi yang terbuka dan proses perencanaan yang inklusif. Masyarakat tidak hanya memahami tujuan program, tetapi juga menyelaraskannya dengan kebutuhan dan harapan mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi telah berhasil membangun pondasi kesadaran kolektif dan penguatan kapasitas lokal.

Lebih jauh lagi, pemerintah desa dan kecamatan menunjukkan peran aktif yang signifikan sebagai penghubung antara perusahaan dan masyarakat. Mereka turut mengawal program dari verifikasi usulan, pengawasan pelaksanaan, hingga evaluasi dampak. PT.Vale pun menunjukkan komitmen nyata dengan menyediakan anggaran, mendampingi proses pelaksanaan, dan secara terbuka merespons aspirasi masyarakat. Kolaborasi ini tidak hanya menghasilkan produk-produk program, tetapi juga menumbuhkan mekanisme kerja sama yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, hasil antara seperti tumbuhnya kepercayaan, meningkatnya partisipasi, dan terbentuknya kesepahaman antar pihak menjadi indikator kuat bahwa proses kolaboratif telah berjalan efektif dan membangun dasar yang kokoh untuk mencapai tujuan jangka panjang, yaitu pembangunan berkelanjutan berbasis green economy.

Dengan demikian, berdasarkan korelasi antara teori tata kelola kolaboratif menurut Ansell & Gash (2008) dan temuan lapangan di kawasan PT.Vale IGP Morowali, dapat dijelaskan bahwa hasil antara menunjukkan capaian-capaian sementara yang menjadi bukti bahwa proses kolaboratif berjalan di jalur yang tepat. Dalam teori, hasil antara berfungsi sebagai indikator kemajuan, penambah motivasi, serta penguat kepercayaan di antara para pemangku kepentingan sebelum tujuan akhir kolaborasi tercapai.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penerapan tata kelola kolaboratif dalam mewujudkan green economy di kawasan PT.Vale IGP Morowali menunjukkan bahwa proses kolaborasi antara berbagai actor yakni perusahaan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat lokal. telah berjalan secara aktif dan konstruktif. Kolaborasi ini ditandai dengan adanya forum dialog tatap muka seperti musyawarah desa dan konsultasi publik, yang menjadi ruang komunikasi terbuka untuk menyampaikan usulan program, mendiskusikan kebutuhan lokal, dan menyusun perencanaan bersama. PT Vale tidak hanya memberikan ruang partisipasi, tetapi juga melakukan verifikasi dan harmonisasi program dengan pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tumpang tindih dan dapat berjalan sinergis.

Kepercayaan antara para pihak dibangun melalui keterbukaan informasi, tanggapan cepat terhadap aspirasi masyarakat, dan konsistensi pelaksanaan program. PT.Vale menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti setiap usulan dengan survei lapangan, penyusunan rencana anggaran, dan pelaporan kepada pihak desa dan kecamatan. Pemerintah desa juga turut aktif menjaga alur komunikasi dan menyampaikan hasil pertemuan kepada masyarakat. Hal ini menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek penerima bantuan, tetapi sebagai bagian dari proses, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi sosial dan kepercayaan terhadap perusahaan.

Komitmen terhadap proses kolaboratif pun tercermin dari partisipasi aktif

seluruh aktor dalam tahapan perencanaan hingga evaluasi. PT.Vale menyediakan anggaran dan dukungan teknis untuk program-program seperti pertanian organik, restorasi ekosistem pesisir, serta pengembangan UMKM dan infrastruktur sosial. Pemerintah kecamatan dan desa memainkan peran penting dalam memediasi serta mengawasi jalannya program agar tetap sesuai dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat pun semakin terdorong untuk ikut serta karena merasa dilibatkan secara nyata dalam pembangunan di lingkungannya sendiri.

Hasil Antara dari proses kolaborasi ini menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi warga, penguatan kelembagaan desa, serta pelaksanaan program lingkungan dan sosial yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan lokal. Dengan membangun pemahaman bersama tentang tujuan green economy tidak hanya sebagai konsep lingkungan, tetapi juga sebagai strategi keadilan sosial dan kesejahteraan, tata kelola kolaboratif yang dijalankan telah menciptakan dasar yang kuat untuk transformasi menuju pembangunan berkelanjutan. Proses ini menjadi bukti bahwa kerja sama lintas sektor dapat menjadi solusi atas kompleksitas persoalan lingkungan dan sosial di kawasan industri pertambangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan untuk memperkuat tata kelola kolaboratif dalam green economy di masa mendatang:

### **1. Bagi PT.VALE IGP MOROWALI**

Di sarankan Untuk menjaga dan memperkuat keberlanjutan kolaborasi yang telah terbangun antara PT Vale, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal,

disarankan agar mekanisme kolaboratif ini tidak berhenti sebagai program jangka pendek, melainkan dikembangkan menjadi sistem kerja sama yang bersifat jangka panjang dan terlembagakan. Kolaborasi yang telah terbukti efektif perlu dijaga konsistensinya melalui forum komunikasi berkala, perjanjian kerja sama yang inklusif, serta pelibatan aktif semua pihak dalam siklus kebijakan mulai dari identifikasi masalah, perumusan solusi, hingga evaluasi dampak.

## 2. Bagi Pemerintah Kecamatan

Kepada pihak pemerintah kecamatan, disarankan untuk terus memainkan peran sebagai penghubung strategis antara masyarakat dan perusahaan. Pemerintah kecamatan memiliki posisi penting dalam memastikan kolaborasi tetap berjalan pada koridor kepentingan publik yang berkelanjutan. Peran positif yang telah ditunjukkan, seperti partisipasi aktif dalam musyawarah dan koordinasi lintas aktor, perlu dilanjutkan dan diperkuat melalui pembentukan forum komunikasi rutin yang terstruktur. Selain itu, kecamatan juga dapat mendorong lahirnya kebijakan lokal atau pedoman teknis yang mendukung sinergi antara program perusahaan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan langkah ini, pemerintah kecamatan akan semakin dipercaya sebagai fasilitator kolaborasi yang netral, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

## 3. Bagi Pemerintah Desa

Kepada pemerintah desa, yang merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan di tingkat lokal, disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mendukung program-program berbasis green economy. Pemerintah desa telah menunjukkan komitmen yang baik dalam menyampaikan

aspirasi masyarakat dan mengawal pelaksanaan program kolaboratif bersama PT Vale. Peran ini sangat strategis untuk terus dijaga dan dikembangkan, misalnya melalui penyusunan perencanaan pembangunan desa yang selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, serta penyampaian laporan pelaksanaan program secara partisipatif dan akuntabel kepada warga. Pemerintah desa juga diharapkan lebih aktif dalam membangun basis data lokal, potensi desa, serta kebutuhan masyarakat, agar program-program yang diusulkan benar-benar berbasis bukti dan berorientasi pada hasil jangka panjang.

#### 4. Bagi Masyarakat Lokal

Kepada masyarakat lokal, disarankan untuk terus mempertahankan peran aktif dan konstruktif dalam setiap proses kolaboratif yang berlangsung. Partisipasi yang telah ditunjukkan mulai dari menyampaikan usulan program, memberikan masukan dalam forum musyawarah, hingga turut serta dalam pelaksanaan kegiatan berbasis lingkungan merupakan modal sosial yang sangat penting untuk mendorong keberlanjutan green economy. Peran ini hendaknya tidak hanya dijaga, tetapi juga diperkuat melalui peningkatan kapasitas individu maupun komunitas dalam memahami isu-isu lingkungan, hak-hak masyarakat, dan peluang ekonomi hijau di sekitar wilayah tambang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S. H. (2022). *Hukum pertambangan*. Sinar Grafika.
- Alfiandri, A., Akbar, D., & Ikhsan, K. (2019). *Collaborative governance: Suatu konsep penguatan kelembagaan dalam dunia investasi*. Umrahpress.
- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). *Instrumen pengumpulan data*.
- Anwar, K. (2024). *Green Economy and Sustainable Development: Jalan Menuju Industri yang Berkelanjutan*. Penerbit NEM.
- Anwar, M. (2022). Green economy sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356.
- Azil, M. F. (2023). *Radio Gaung Aman Sebagai Media Perjuangan Masyarakat Adat*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ....
- Bakri, W., Laupe, S., & Salam, A. M. I. (2023). Pertambangan kawasan karts dan kondisi sosial masyarakat. *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 3(1), 139–150.
- Botutihe, A. N., & Paksi, A. K. (2024). Dampak Strategi Investasi Nikel Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Dalam Negeri. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 8(2), 178–192.
- Dyanasari, D., Octaviana, H., Fardhoni, F., Yusuf, Y., Neng, N., Siti, M., Hasmawaty, H., Khairol, R., Enda, K. S., & Fauzan, M. A. (2022). *BUKU AJAR EKONOMI LINGKUNGAN*. PENERBIT MITRA CENDEKIA MEDIA.
- Fadilla, M., Nurmawati, E., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Peran Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Dalam Perspektif Islam. *JEKSYAH: Islamic Economics Journal*, 2(01), 54–63.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Firdhausi, N. F. (2024). Oleh Nirmala Fitria Firdhausi, S. Si., M. Si. *Biologi Lingkungan*, 42.
- Ginting, S. B. (2024). Ekonomi Hijau Yang Berkeadilan, Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Profile Hukum*, 118–126.
- Hardi, W. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*.
- Lesmana, N. (2025). *SUSTAINABILITY LEADERSHIP*. Cendikia Mulia Mandiri.
- LIEMIN, A. (2019). *ANALISIS KEGIATAN INDUSTRI PERTAMBANGAN TERHADAP PEMANFAATAN LAHAN DI KECAMATAN BAHODUPI KABUPATEN MOROWALI*. UNIVERSITAS BOSOWA.

- Mas, I. G. A. M. A., Pratiwi, A., Nurhayati, N., Apriyanto, A., Kusumastuti, S. Y., & Wijaya, R. (2024). *Green Economy*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Maslan, M. (2022). *Isolasi dan Identifikasi Bakteri Pengakumulasi Logam Berat sebagai Agen Bioremediasi dari Pesisir Kawasan Industri di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Miftahuddin, M. (2022). *DYNAMIC GOVERNANCE PADA PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. VALE INDONESIA TBK KABUPATEN LUWU TIMUR=DYNAMIC GOVERNANCE IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM PT. VALE INDONESIA TBK, EAST LUWU DISTRICT*. Universitas Hasanuddin.
- Najicha, F. U. (2021). Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Padilah, A. H., Fayumi, D. F., & Nurviyanti, M. D. (2023). Partisipasi politik dalam pembangunan desa di kecamatan Sayan Kabupaten Melawi. *Journal of Social and Policy Issues*, 192–201.
- Parmawati, R. (2019). *Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam & Lingkungan Menuju Ekonomi Hijau*. Universitas Brawijaya Press.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rachmawati, A. (2020). *Evaluasi Dampak Program Corporate Social Responsibility (Csr) Pt Pertamina Mor V Pada Kemandirian Masyarakat Berbasis Green Economy Di Jagir Wonokromo Kota Surabaya*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Ramadhani, N. A., Setyowati, A. E., & Arwanto, B. (2022). Kewenangan penguasa negara terhadap sumberdaya alam atas bentuk pengusahaan perkebunan sawit. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 89–96.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Romli, M. (2024). Integrasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Hijau (Green Economy) Di Indonesia. *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 8(1), 1–14.
- Salama, M. A. (2022). *Analisis Kebijakan Carbon Pricing di Indonesia Sebagai Upaya Pelaksanaan Kewajiban Dalam Paris Agreement= Analysis of Carbon Pricing Policy in Indonesia as an Effort to implement Obligations in the Paris Agreement*. Universitas Hasanuddin.
- Sarie, F., Untarti, A., Amrullah, M. N. K., Syah, R. F., Amruddin, M. P., Ir Wati Asriningsih Pranoto, M. T., Back, S. W., Arini, D. U., MM, P., & Ir Kiki Kunthi Lestari, M. T. (2023). *MENGENAL EKOLOGI SOSIAL*. Cendikia Mulia Mandiri.

- Sentanu, I. G. E. P. S., Yustiari, S. H., & S AP, M. P. A. (2024). *Mengelola Kolaborasi Stakeholder Dalam Pelayanan Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Siringo-ringgo, M. (2024). Kebijakan Energi dan Dampak Lingkungan: Menuju Model Berkelanjutan. *Circle Archive*, 1(5).
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Sudiarta, I. I. K., Situmeang, I. Y. P., & Suryani, S. A. M. P. (2024). *Pengelolaan Pesisir Terpadu*. Scopindo Media Pustaka.
- Susanto, E., & Sirnawati, N. K. (2023). Perilaku Keuangan Berkelanjutan: Dampak Investasi Sosial dan Lingkungan. *Syntax Idea*, 5(12), 2604–2619.
- Wahidmurni, W. (2017). *Pemaparan metode penelitian kualitatif*.
- Wibisono, R. B. (2024). KEADILAN IKLIM DAN HAM DI INDONESIA: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 17(2), 95–125.
- Widyaningrum, R. A. (2020). *Analisis Penerapan Green Banking Pada BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun*. IAIN Ponorogo.
- Wijaya, R. F., Kurniawan, F., Putra, R. R., & Alvin, A. (2024). *Sistem Informasi Transparansi Pengelolaan Kegiatan Publik*. Serasi Media Teknologi.
- Yusman, Y., Putra, R. R., & Sinaga, I. (2024). *Penerapan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik di Era Digital*. Serasi Media Teknologi.

## LAMPIRAN



**Universitas  
Muhammadiyah  
Makassar**  
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
Faculty of Social and Political Sciences  
Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221  
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588  
Official Email: [fisip@unismuh.ac.id](mailto:fisip@unismuh.ac.id)  
Official Web: <https://fisip.unismuh.ac.id>

---

Nomor : 0482/FSP/A.6-VIII/V/1446 H/2025 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksampler  
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di –  
Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Indra Parawansyah  
St a m b u k : 105641101121  
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan  
Lokasi Penelitian : Di Kawasan PT. Vale IGP Morowali Sulawesi Tengah.  
Judul Skripsi : *“Tata Kelola Kolaboratif dalam Mewujudkan Green Economy di Kawasan PT. Vale IGP Morowali”*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

22 Mei 2025  
Ketua Jurusan

Dr. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si  
BM: 984810




Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia  
Progress for the Nation and Humankind

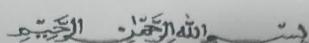
Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi  
Public Administration - Government Studies - Communication Science





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588



**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Indra Parawansyah

Nim : 105641101121

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	2%	10 %
2	Bab 2	14%	25 %
3	Bab 3	4%	10 %
4	Bab 4	1%	10 %
5	Bab 5	2%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

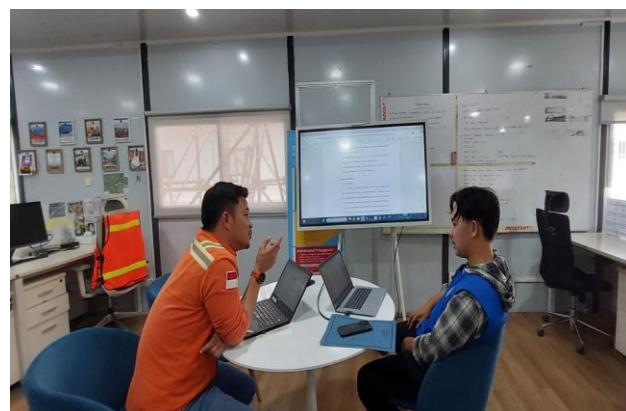
Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 14 Agustus 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,





*Dokumentasi dengan Pihak PT.Vale*



*Dokumentasi dengan Camat Bungku timur dan Kepala desa Kolono*



*Dokumentasi dengan Masyarakat geresa*



*Dokumentasi dengan PT.Vale dan Masyarakat Bahomotefe*